



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkualitas.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, system fisik dan non fisik penyediaan air minum kepada masyarakat.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, membangun, merabilitasi, uprating dan memperluas system fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
11. Pengelolaan SPAM adalah, kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningktakan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
12. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum pada wilayah Kabupaten Temanggung.

13. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kabupaten Temanggung.
14. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disingkat air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
15. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari.
16. Air bersih terdiri dari air bersih perpipaan dan non perpipaan.
17. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
18. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
19. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM Kabupaten Temanggung;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengenai Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan, Skenario Pengembangan, Sasaran Kebijakan, dan Rencana Tindak SPAM.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 4

- (1) Jakstrada SPAM Daerah, ditetapkan sebagai dokumen Kebijakan Strategi Daerah SPAM di dalam satu Daerah;
- (2) Kebijakan dan Strategi Daerah dalam SPAM Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - b. Rencana Strategis Daerah;
 - c. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
 - e. Kondisi Daerah dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya;
- (3) Kebijakan dan Strategi Daerah dalam SPAM Kabupaten Temanggung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan dan Strategi Daerah SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SPAM

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh SKPD yang terkait bidang air minum dan/atau ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Tindak yang telah disusun, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya dan Pengelola SPAM.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 30 Maret 2016

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 30 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2016

PENDAHULUAN

Bab 1



1.1. LATAR BELAKANG

1. Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut;
2. Selaras dengan amanat Undang-Undang No. 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Sebagai alat pengatur dalam Penyelenggaraan SPAM dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 11/1974 tentang Pengairan, yang diturunkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang bertujuan untuk tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi "Hak Rakyat Atas Air", terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa; dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;

4. Arah kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan SPAM telah dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN dan RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (Renstra Kementerian dan Renstrada)
5. Kesepakatan MDG's di bidang air minum mengikat komitmen pemerintah untuk dapat mencapai cakupan pelayanan 68,87 % penduduk pada tahun 2015, dan sesuai dengan RPJMN 2015-2019 pada tahun 2019, menjadi 100 % penduduk memperoleh akses air minum aman.
6. Dalam visi pembangunan Kabupaten Temanggung 2013-2018, diharapkan akan terwujud rasa aman sehingga seluruh masyarakat dapat melaksanakan aktifitas dalam suasana kondusif dan terpenuhi hak-hak dasar manusia dalam bidang kesehatan (termasuk air minum);

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Temanggung dalam Penyelenggaraan SPAM tersebut diatas (butir 4, 5 dan 6) dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (KSDP-SPAM) Kabupaten Temanggung yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM.

1.2. PENGERTIAN

Masalah semua yang ada dalam Jakstranas

1) Corporate Social Responsibilities (CSR)

Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap social/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

- 2) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan
- 3) Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM
Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha
- 4) Millenium Development Goals (MDG's)
Hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.
- 5) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
 - a. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan
 - b. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - c. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan
 - d. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 6) Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM
Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
- 7) Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM
Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis, teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM yang telah ditetapkan;
 - b. Hasil kajian kelayakan teknis, teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial, serta;
 - c. Kajian sumber pembiayaan.

8) Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan / atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

KSDP-SPAM Kabupaten Temanggung ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten, Pengelola (PDAM dan bukan PDAM) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.

KSDP-SPAM ini bertujuan untuk:

- 1) Menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
- 2) Menyelenggarakan sistim fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- 3) Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

1.4. LANDASAN HUKUM

1.4.1. Arah Kebijakan Usulan yang ada dalam Jakstranas

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

-
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

-
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air;
 - p. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 - r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
-

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

Bab

2

2.1. UMUM

- 1) Visi dari Jakstra Pengembangan SPAM pada dasarnya merupakan suatu rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM di daerah.
- 2) Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi pengembangan SPAM (penyediaan air minum) selama 5 tahun mendatang di daerah yang bersangkutan.
- 3) Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja kebijakan dan strategi pengembangan SPAM.
- 4) Visi harus bersifat rasional, realistis dan mudah dipahami;
- 5) Visi harus bersifat fleksibel, sehingga bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi;
- 6) Visi kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah harus mendukung pencapaian visi daerah.

Kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan misi Jakstra Pengembangan SPAM antara lain:

- 1) Dapat merupakan penjabaran secara umum dari kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM;
- 2) Menggambarkan tindakan yang akan dilakukan agar visi yang diinginkan (jangka waktu 5 tahun) bisa tercapai; dan
- 3) Menjembatani penjabaran visi kepada tujuan.

2.2. VISI

2.2.1. RPJPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2005-2025

Berdasarkan pada kondisi daerah tahun 2005, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka dirumuskan visi daerah tahun 2005-2025 adalah:

"TEMANGGUNG MAKIN MAJU, MANDIRI, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA"

Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian, keamanan, keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan makna visi, untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung.

2.2.2. RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013-2018

Visi Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 merupakan perwujudan dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih, yaitu:

"TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH"

Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

2.2.3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM NASIONAL (KSNP SPAM)

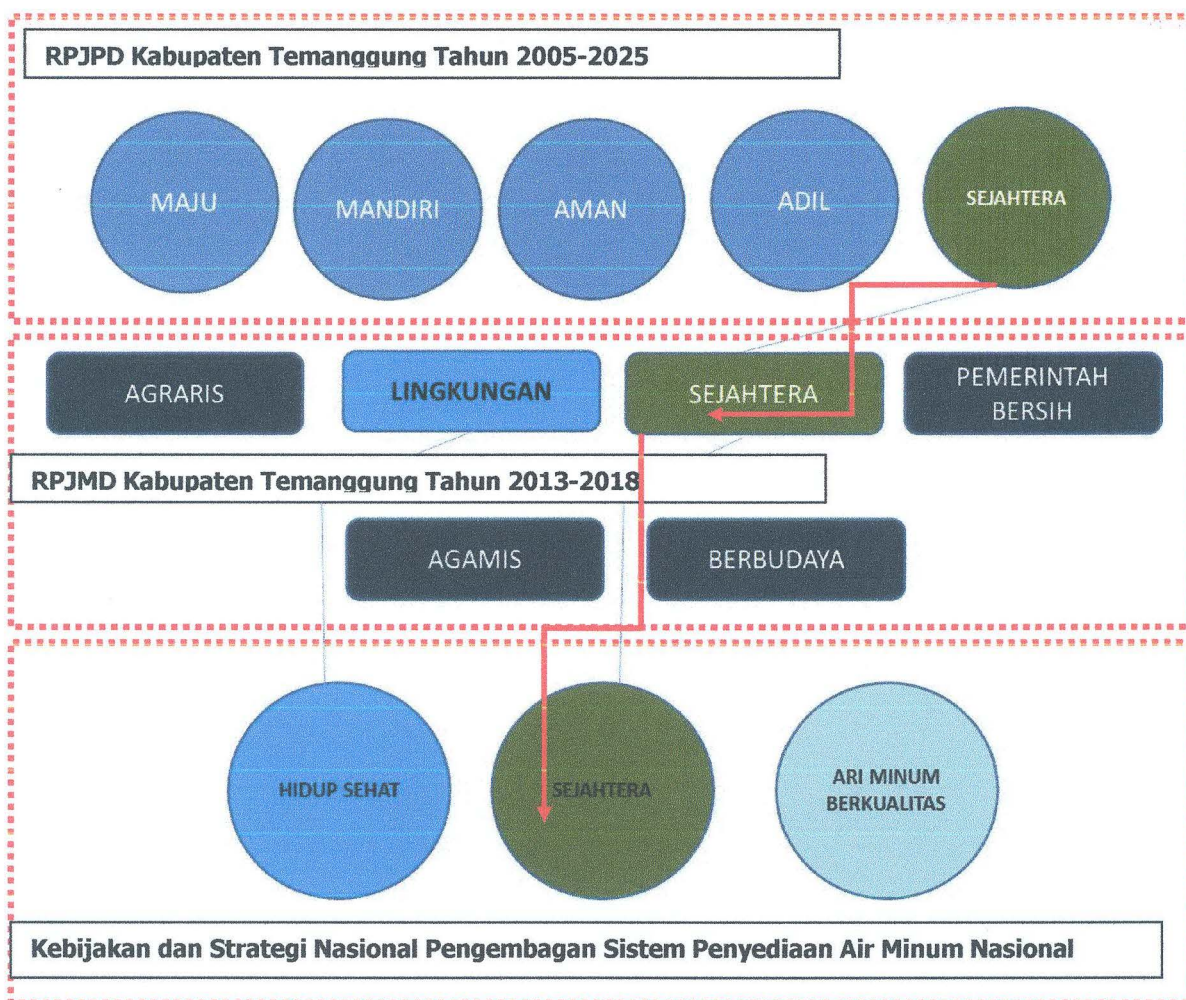
TERWUJUDNYA MASYARAKAT HIDUP SEHAT DAN SEJAHTERA DENGAN AIR MINUM BERKUALITAS

Visi pengembangan SPAM adalah suatu keadaan masyarakat yang ingin dicapai di masa depan yang secara mandiri mampu hidup dengan sehat dan sejahtera. Visi akan dapat terwujud melalui kerjasama yang sinergis antara seluruh pemangku kepentingan, baik yang langsung terkait maupun tidak, dalam kegiatan pengembangan SPAM.

Dalam kerjasama ini, Pemerintah lebih berperan dalam melakukan pemberdayaan kepada pemerintah daerah, masyarakat, maupun Penyelenggara SPAM. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi penyelenggaraan pengembangan SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan bersama. Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan.

2.2.4. VISI SPAM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016-2020

Beberapa kata-kata kunci yang termuat dalam: RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 dan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Nasional (KSNP SPAM) yang termuat dalam: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 13/PRT/M/2013. Dapat di buat skematik keterkaitan/kesamaan akan kata kunci yaitu:



GAMBAR : 2.1. SKEMATIS KATA KUNCI PERUMUSAN VISI SPAM KABUPATEN TEMANGGUNG

- ✍ Kesamaan kata kunci ke tiga (3) visi adalah: SEJAHTERA
- ✍ Kesamaan arti kata kunci ke 2 (dua) visi adalah: Lingkungan, Hidup Sehat.

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat- tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi berbasis agro/agraris;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari perusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah, swasta dan lembaga lainnya bersama masyarakat mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka visi pengembangan SPAM ditetapkan sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN
DENGAN TERPENUHINYA AKSES AIR MINUM YANG SEHAT**

1) KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

- ✍ Artinya kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan, tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada kompetisi ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional berbasis pada potensi unggulan daerah. Sebagai daerah AGRARIS yang telah melakukan transaksi ekonomi baik lokal maupun internasional, memiliki kemampuan daya saing yang cukup tinggi, ditopang oleh pengembangan infrastruktur ekonomi yang memadai, pasar yang prospektif, sumber daya manusia yang kompetitif, regulasi yang mendukung, pelestarian lingkungan, dan dukungan sumber daya energy serta sumber daya lainnya.
- ✍ Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur daya saing daerah adalah peningkatan: nilai pendapatan perkapita terus meningkat serta tingkat tingkat pendidikan semakin meningkat.

2) BERKELANJUTAN

- ✍ Berkelanjutan artinya Menunjukkan kemakmuran dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan kemanfaatan sumberdaya alam khususnya air sepanjang masa bukan hanya sekali pakai habis atau rusak, baik secara ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil).
- ✍ Masyarakat sejahtera adalah yang berilmu, sehat dan terpenuhi kebutuhan ekonominya dengan memadai. Kekayaan sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi harus beriringan dengan peningkatan kesejahteraan dari sisi sosial; terutama melalui penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar yang benar-benar dirasakan masyarakat. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan kesenjangan pendapatan dan pembangunan antar wilayah.

3) AKSES AIR MINUM YANG SEHAT

- ✍ Air minum adalah merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- ✍ Akses air minum, adalah target pencapaian akses aman air minum 100%.

- ✍ Air minum yang sehat, adalah air bersih adalah air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut. Air merupakan zat yang mutlak bagi setiap mahluk hidup dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan (Dwijosaputro, 1981).

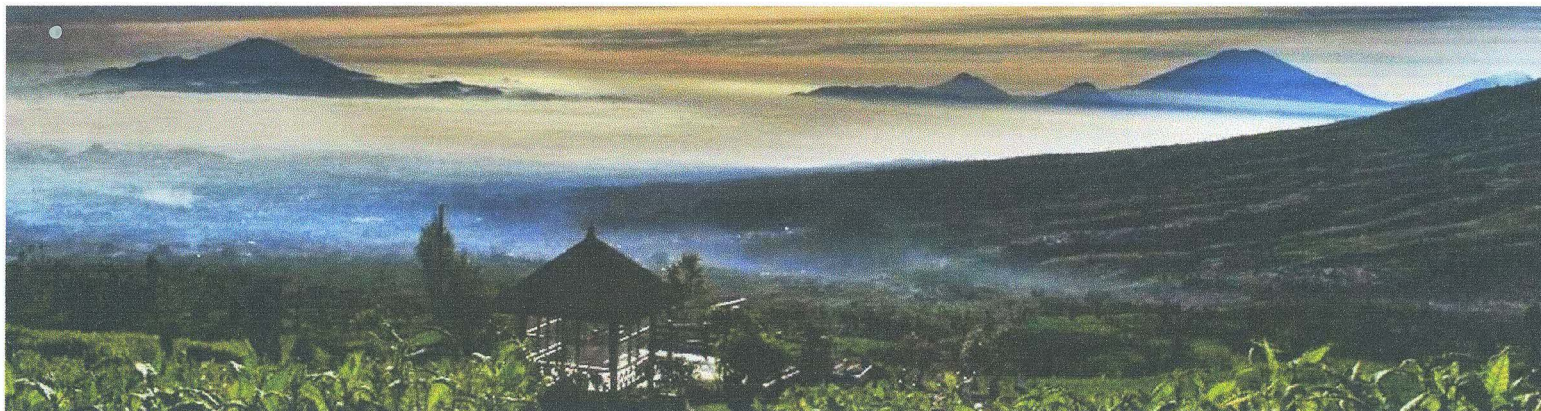
2.3. MISI

Kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan misi Jakstra Pengembangan SPAM antara lain:

- a. dapat merupakan penjabaran secara umum dari kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM;
- b. menggambarkan tindakan yang akan dilakukan agar visi yang diinginkan (jangka waktu 5 tahun) bisa tercapai; dan
- c. menjembatani penjabaran visi kepada tujuan.

Dengan melihat contoh Visi yang telah dirumuskan di atas, maka Misi-nya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Mengembangkan, membangun, memperluas cakupan pelayanan** air minum untuk seluruh masyarakat sesuai dengan kaidah teknis yang berkelanjutan dan kearifan lokal.
2. **Memenuhi kebutuhan air baku** untuk pengembangan SPAM
3. **Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM** dan mengembangkan serta menerapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) di daerah sehingga dapat mengelola pelayanan air minum dengan efisien dan transparan, partisipatif dan akuntabel;
4. Mengembangkan **peran badan usaha swasta dan masyarakat** dalam pengembangan sebagai mitra SPAM yang berkualitas.



3.1. PROFIL KABUPATEN TEMANGGUNG

3.1.1. GEOGRAFIS WILAYAH

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 870,65 Km². Secara geografis, Kabupaten Temanggung terletak diantara 7°04' LS – 7°24' LS (Lintang Selatan) dan 109°55' BT – 110°19' BT (Bujur Timur). Batas - batas Wilayah:

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Kendal dan Kab.Semarang
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Semarang dan Kab.Magelang

Secara Administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 desa dan 23 kelurahan, dengan 1.584 dusun.

3.1.2. KEPENDUDUKAN

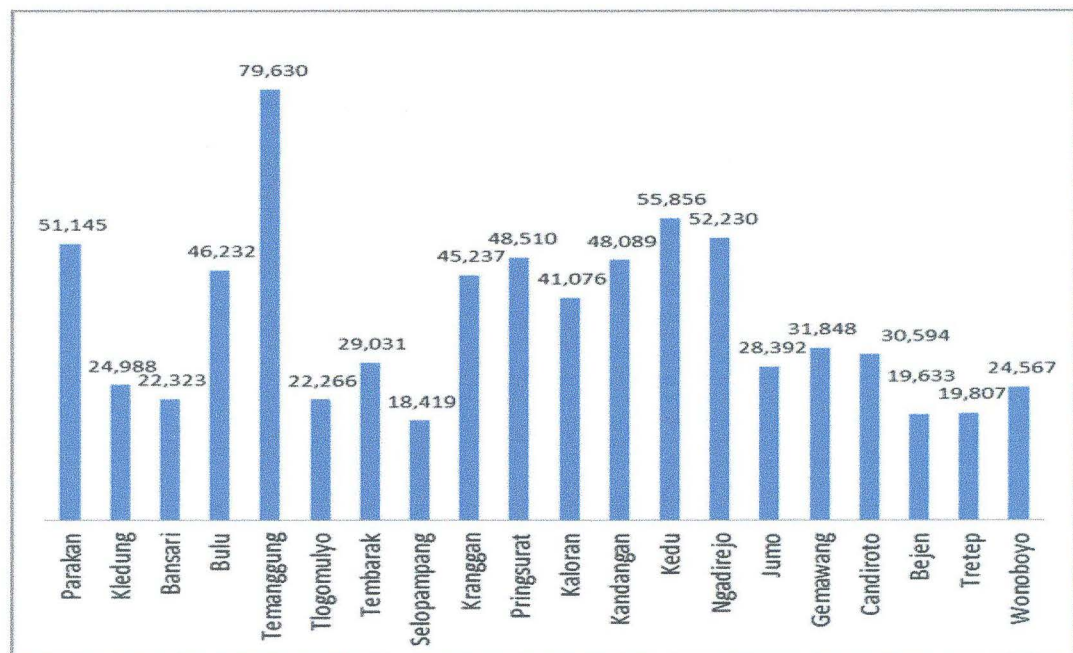
A. JUMLAH DAN JENIS KELAMIN PENDUDUK

Berikut disajikan dalam tabel terkait data jumlah penduduk dan jenis kelamin tiap kecamatan. Berdasarkan data laporan Daerah Dalam Angka (DDA) Kabupaten Temanggung Tahun 2014, jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Temanggung tercatat sebanyak 79,630 jiwa atau berkisar 10,8% dari total penduduk di Kabupaten Temanggung sebesar 739,873. Keseluruhan jumlah penduduk tersebut menyebar ke seluruh kecamatan.

TABEL: 3.1. JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG, 2013

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1.Parakan	25,548	25,597	51,145	6.9%
2.Kledung	12,636	12,352	24,988	3.4%
3.Bansari	11,320	11,003	22,323	3.0%
4.Bulu	23,516	22,716	46,232	6.2%
5.Temanggung	39,290	40,340	79,630	10.8%
6.Tlogomulyo	11,183	11,083	22,266	3.0%
7.Tembarak	14,635	14,396	29,031	3.9%
8.Selopampang	9,199	9,220	18,419	2.5%
9.Kranggan	22,511	22,726	45,237	6.1%
10.Pringsurat	24,391	24,119	48,510	6.6%
11.Kaloran	20,440	20,636	41,076	5.6%
12.Kandangan	24,239	23,850	48,089	6.5%
13.Kedu	28,103	27,753	55,856	7.5%
14.Ngadirejo	26,297	25,933	52,230	7.1%
15.Jumo	14,131	14,261	28,392	3.8%
16.Gemawang	16,085	15,763	31,848	4.3%
17.Candiroto	15,202	15,392	30,594	4.1%
18.Bejen	9,909	9,724	19,633	2.7%
19.Tretep	10,016	9,791	19,807	2.7%
20.Wonobojo	12,346	12,221	24,567	3.3%
Jumlah	370,997	368,876	739,873	100.0%

Sumber: DDA Kab Temanggung Tahun 2014



GAMBAR : 3.1. JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN TAHUN 2013

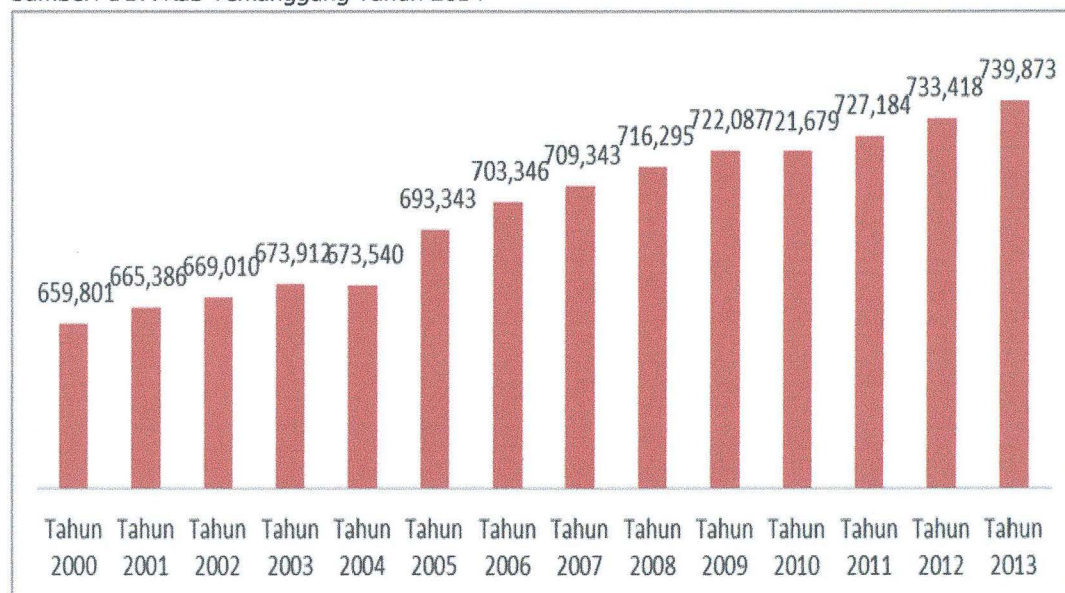
B. KEPADATAN PENDUDUK, SEX RATIO PENDUDUK

Berdasarkan data kepadatan penduduk di tiap kecamatan, kepadatan paling tinggi ada di Kecamatan Temanggung dan Parakan (2.364 jiwa/km² dan 2.281 jiwa/km²). Lihat tabel dan gambar berikut.

TABEL: 3.2. KEPADATAN PENDUDUK, SEX RATIO MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG, 2013

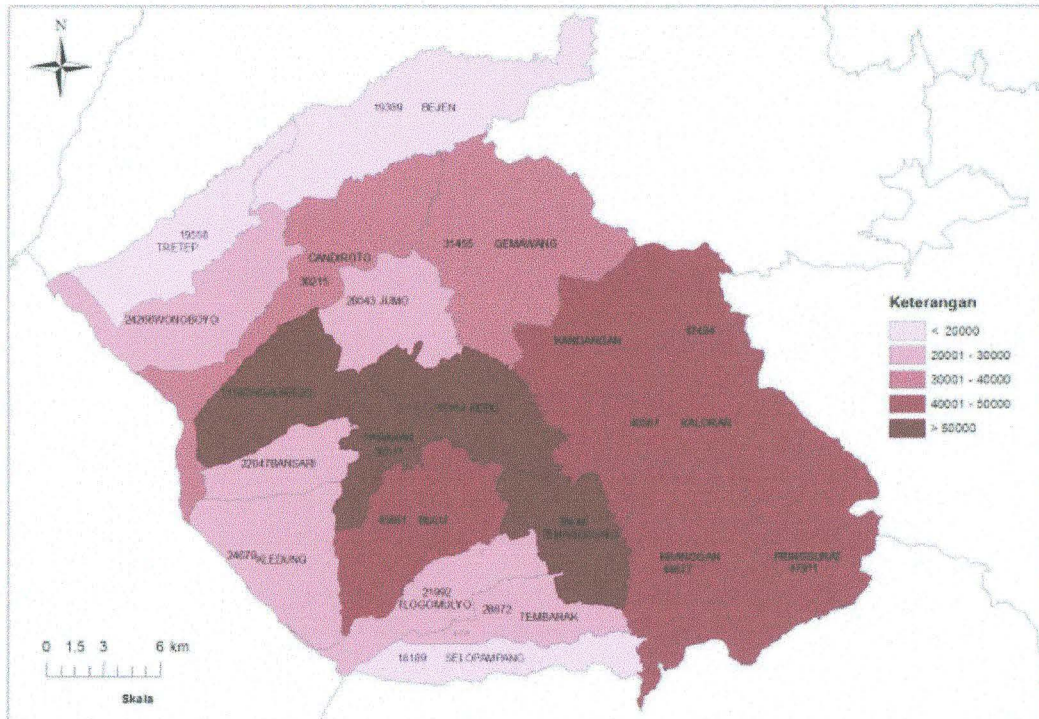
Kecamatan	Kepadatan Penduduk (per Km ²)	Sex Ratio
Parakan	2,281	99,83
Kledung	769	102,32
Bansari	982	102,91
Bulu	1,065	103,55
Temanggung	2,364	97,42
Tlogomulyo	889	100,93
Tembarak	1,072	101,68
Selopampang	1,056	99,80
Kranggan	778	99,08
Pringsurat	840	101,15
Kaloran	637	99,08
Kandangan	608	101,66
Kedu	1,584	101,29
Ngadirejo	971	101,43
Jumo	960	99,11
Gemawang	470	102,07
Candiroto	506	98,79
Bejen	283	101,93
Tretep	583	102,33
Wonobojo	554	101,05

Sumber: DDA Kab Temanggung Tahun 2014



Sumber: DDA Kab Temanggung Tahun 2014

GAMBAR : 3.2. PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, 2000-2013



GAMBAR : 3.3. PETA TEMATIK PERSEBARAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG 2013

C. PERKEMBANGAN PENDUDUK

Perkembangan penduduk dari Tahun 2000 sampai dengan 2013 berdasarkan data hasil olahan registrasi dan proyeksi terjadi pertumbuhan positif (terjadi peningkatan jumlah penduduk). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

TABEL: 3.3. PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, 2000-2013

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2000	326,551	333,250	659,801
2001*)	329,404	335,982	665,386
2002*)	331,283	337,727	669,010
2003*)	333,803	340,109	673,912
2004*)	339,364	344,176	683,540
2005*)	344,825	348,518	693,343
2006*)	350,055	353,291	703,346
2007*)	353,371	355,972	709,343
2008*)	357,299	358,996	716,295
2009*)	360,112	361,975	722,087
2010**)	361,728	359,951	721,679
2011**)	364,590	362,594	727,184
2012**)	367,807	365,611	733,418
2013**)	370,997	368,876	739,873
Keterangan:	*) Hasil Olahan Registrasi Penduduk		
	**) Hasil Proyeksi		

Sumber: DDA Kab Temanggung Tahun 2014

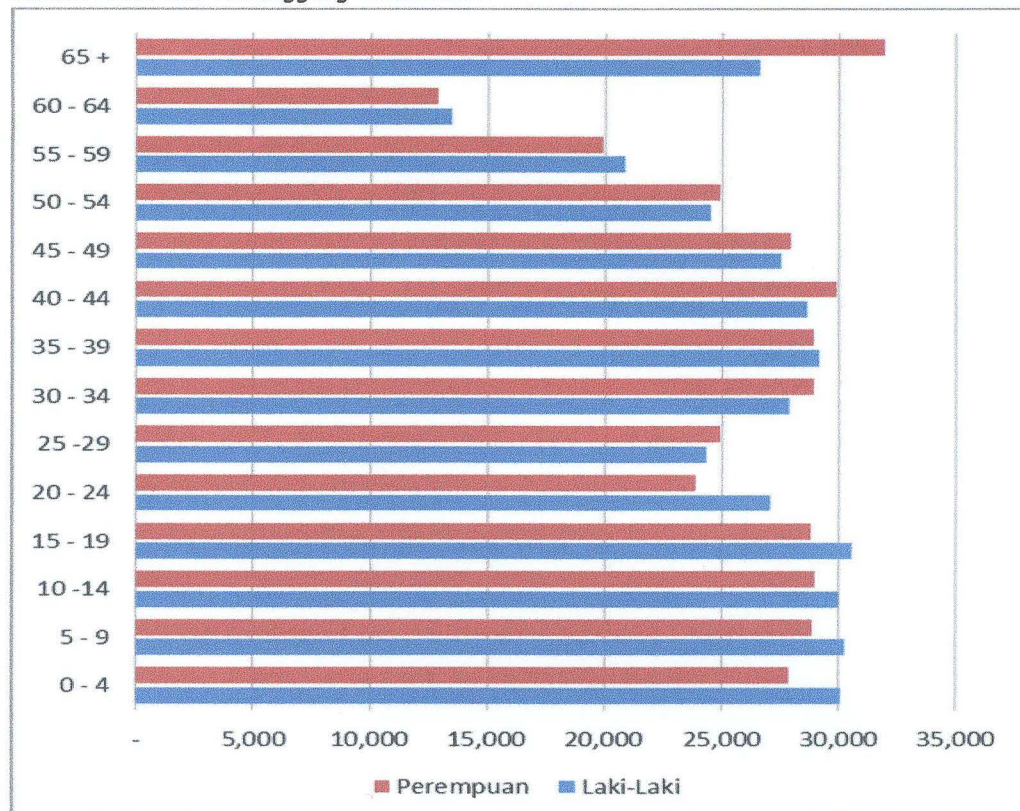
D. KELOMPOK UMUR PENDUDUK

Data angkatan kelompok umur yang tercatat dari Tahun 2013, terbesar pada kelompok umur 5 – 10 dengan jumlah 59.158 jiwa, sedangkan untuk jumlah terkecil terdapat pada kelompok umur 60 – 64 dengan jumlah 26.419 jiwa.

TABEL: 3.4. JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR, 2013

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	30 092	27 873	57 965
5 - 10	30 266	28 892	59 158
11-14	29 980	28 974	58 954
15 - 19	30 563	28 831	59 394
20 - 24	27 068	23 911	50 979
25 - 29	24 333	24 927	49 260
30 - 34	27 906	28 958	56 864
35 - 39	29 146	28 916	58 062
40 - 44	28 667	29 913	58 580
45 - 49	27 536	27 942	55 478
50 - 54	24 507	24 908	49 415
55 - 59	20 843	19 927	40 770
60 - 64	13 489	12 930	26 419
65 +	26 601	31 974	58 575
Jumlah	370 997	368 876	739 873

Sumber: DDA Kab Temanggung Tahun 2014



GAMBAR : 3.4. JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR, 2013

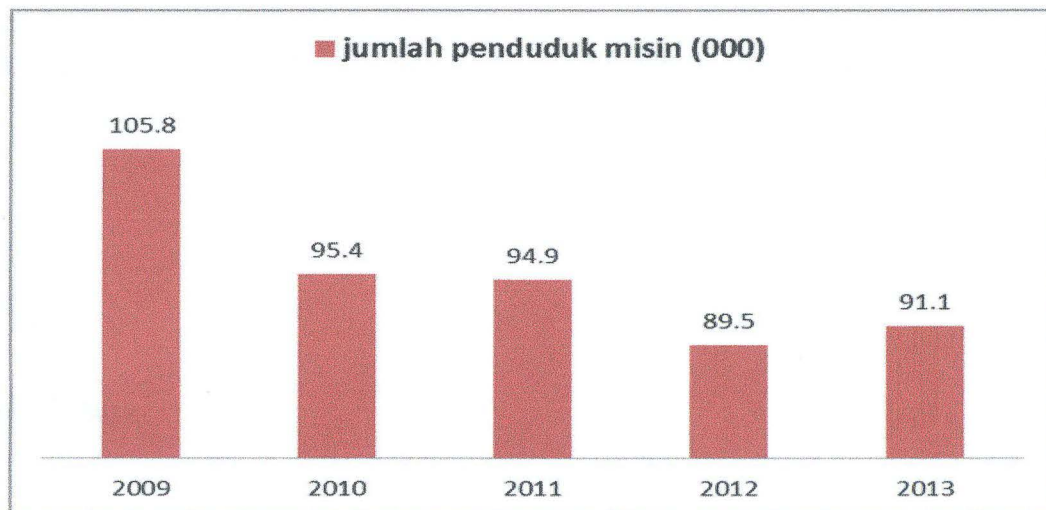
E. PENDUDUK MISKIN

Data penduduk miskin di Kabupaten Temanggung tercatat dari tahun 2009 – 2013 terjadi penurunan dengan kondisi pada Tahun 2009 sebesar 105.800 jiwa dan pada tahun 2013 adalah sebesar 91.100 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL: 3.5. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN GARIS KEMISKINAN (SERIES TAHUN)

Indikator kemiskinan	2009	2010	2011	2012	2013
jumlah penduduk misin (000)	105.8	95.4	94.9	89.5	91.1
P0 (persentase penduduk miskin)	15.05	13.46	13.38	12.32	12.42
P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan)	2.58	1.73	1.93	1.85	1.46
P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan)	0.76	0.34	0.45	0.41	0.26
Garis Kemiskinan (Rupiah)	164343	178814	198888	212487	229548

Sumber: DDA Kab Temanggung Tahun 2014



GAMBAR : 3.5. JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009-2013

3.1.3. PEREKONOMIAN DAERAH

A. APBD

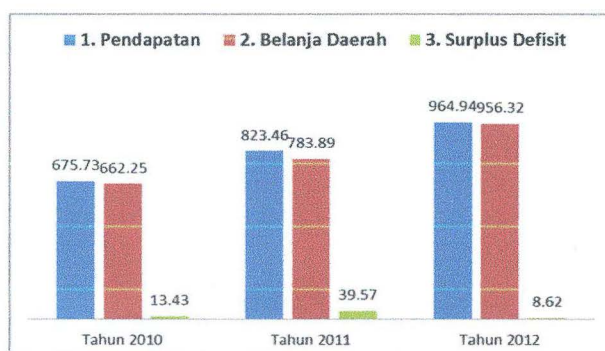
Untuk membiayai pembangunan, Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2012 menghabiskan anggaran sebesar 956,32 milyar rupiah. Dibandingkan Tahun 2011 jumlah belanja mengalami kenaikan sekitar 22%, kenaikan ini meliputi hampir semua komponen belanja baik belanja langsung maupun belanja tak langsung.

Pada komponen belanja tank langsung dari tahun 2011 ke 2012 naik 44,77 milyar rupiah atau sebesar 7,52%, sedangkan di komponen elanja langsung naik 127,66 milyar rupiah atau sebesar 67,66%. Penyerapan anggaran belanja yang terbesar adalah untuk komponen belanja pegawai yang memang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Dari sisi pendapatan dalam periode 2011-2012 mengalami kenaikan 17,18% yaitu dari 823,46 milyar rupiah menjadi 964,94 milyar rupiah. Dari 3 komponen terbesar masih mengandalkan dari dana perimbangan yaitu sebesar 73,29% disusul pendapatan lain-lain sebesar 18,77%, sedangkan Pendapatan asli daerah hanya berkontribusi sebesar 7,94%.

TABEL: 3.6. APBD KABUPATEN TEMANGGUNG (TAHUN 2010-2012)

Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1. Pendapatan	675.73	823.46	964.94
PAD	55.2	63.33	76.64
Dana Perimbangan	522.19	574.91	707.24
Lain-Lain	98.34	185.22	181.06
2. Belanja Daerah	662.25	783.89	956.32
Belanja Tak Langsung	523.98	595.21	639.98
Belanja Langsung	138.27	188.68	316.34
3. Surplus Defisit	13.43	39.57	8.62



GAMBAR : 3.6. APBD KABUPATEN TEMANGGUNG

B. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Temanggung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013–2018, analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Temanggung, serta memperhatikan kondisi ekonomi daerah, nasional dan global, maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2015 tetap diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada :

- ✍ Sektor-sektor unggulan yang dimiliki dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- ✍ Sektor-sektor yang potensial untuk mendorong penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- ✍ Sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.

C. KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2013 DAN PERKIRAAN TAHUN 2014

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing. Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, dan Nilai Investasi serta Tenaga Kerja.

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator ekonomi makro daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto PDRB selama tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 3.7.

TABEL: 3.7. PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008-2012

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan	
	Jutaan Rupiah	Pertumbuhan (%)	Jutaan Rupiah	Pertumbuhan (%)
2008	4.125.938,97	13,18	2.219.155,63	3,54
2009	4.502.652,25	9,13	2.309.841,53	4,09
2010	5.069.020,30	12,58	2.409.386,40	4,31
2011	5.603.983,71	10,55	2.521.439,02	4,65
2012	6.198.351,81	10,61	2.648.488,46	5,04

Tabel 3.7 menunjukkan adanya peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku pada setiap tahun. Pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga berlaku telah mencapai nilai Rp. 6.198.351,81 juta, menempati rangking ke 28 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp. 5.603.983,71 juta sehingga terjadi pertumbuhan sebesar 10,61%. Perbandingan nilai PDRB atas dasar harga berlaku di wilayah karesidenan Kedu, Kabupaten Temanggung menempati rangking ke empat setelah Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Jika dilihat dari distribusinya per kecamatan, maka kecamatan penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten adalah Kecamatan Temanggung sebesar 12,67%, Kecamatan Pringsurat sebesar 8,71% dan Kecamatan Parakan sebesar 8,40%. Sedangkan kecamatan penyumbang PDRB Kabupaten terkecil adalah Kecamatan Selopampang sebesar 2,15%. Secara lengkap sebagaimana tabel 3.8.

TABEL: 3.8. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TINGKAT KECAMATAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2012

No	Kecamatan	PDRB ADHB (juta rupiah)	Persentase
1	Parakan	520.725,67	8,40
2	Kledung	277.893,13	4,48
3	Bansari	173.205,23	2,79
4	Bulu	351.760,12	5,67
5	Temanggung	785.129,54	12,67
6	Tlogomulyo	191.537,60	3,09
7	Tembarak	239.069,30	3,86
8	Selopampang	133.394,79	2,15
9	Kranggan	409.772,98	6,61
10	Pringsurat	539.739,35	8,71
11	Kaloran	309.729,19	4,99
12	Kandangan	351.568,23	5,67
13	Kedu	407.226,11	6,57
14	Ngadirejo	379.843,34	6,13
15	Jumo	231.723,51	3,74
16	Gemawang	210.540,06	3,40
17	Candiroto	191.674,53	3,09
18	Bejen	162.161,21	2,62
19	Tretep	141.657,47	2,29
20	Wonobooyo	190.000,45	3,07
	Jumlah	6.198.351,81	100,00

Sumber: RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015

b. PDRB Perkapita

Secara konsepsional PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil. Perkembangannya tercantum pada tabel 2.28.

TABEL: 3.9. PERKEMBANGAN PDRB PER KAPITAKABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008-2012

Tahun	PDRB Per kapitaADHB		PDRB Per kapitaADHK	
	Rupiah	Pertumbuhan (%)	Rupiah	Pertumbuhan (%)
2008	5.857.413,97	12,29	3.150.437,58	2,73
2009	6.333.191,62	8,25	3.248.900,47	3,25
2010	7.064.501,89	12,04	3.357.870,71	3,81
2011	7.738.502,63	9,69	3.481.837,83	3,83
2012	8.482.526,56	9,65	3.624.491,54	4,13

Sumber: RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Selanjutnya dari tabel 3.9 dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tahun 2008 PDRB per kapita sebesar Rp.5.857.413,97 dan pada tahun 2012 menjadi Rp. 8.482.526,56. PDRB perkapita atas dasar harga konstan pada tahun 2008 sebesar Rp.3.150.437,58 dan pada tahun 2012 menjadi Rp.3.624.491,54. Capaian PDRB perkapita Kabupaten Temanggung tersebut masih jauh dibawah PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah, namun setidaknya sudah dapat menggambarkan adanya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung nilai PDRB perkapitanya menempati ranking ketiga apabila dibandingkan dengan PDRB perkapita kabupaten/kota se wilayah karesidenan Kedu, yaitu setelah Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Perbandingan PDRB perkapita antara Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah tersebut pada tabel 3.10.

TABEL: 3.10. PERBANDINGAN PDRB PER KAPITA PROVINSI JAWA TENGAH DAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008-2012

Tahun	PDRB perkapitaADHB (Rp.)		PDRB perkapitaADHK (Rp.)	
	Temanggung	Jawa Tengah	Temanggung	Jawa Tengah
2008	5.857.413,97	11.406.655	3.150.437,58	5.220.713
2009	6.333.191,62	12.322.889	3.248.900,47	5.471.490
2010	7.064.501,89	13.730.016	3.357.870,71	5.773.809
2011	7.738.502,63	15.380.771	3.481.837,83	6.114.211
2012	8.482.526,56	17.140.206	3.624.491,54	6.494.368

Sumber: RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau telah menghilangkan pengaruh inflasi diperoleh dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung untuk tahun 2012 sebesar 5,04%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011 yang sebesar 4,65%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 3.11.

TABEL: 3.11. PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA TENGAH, DAN NASIONAL TAHUN 2008-2012

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2008	3,54	5,61	6,01
2009	4,09	5,14	4,58
2010	4,31	5,84	6,10
2011	4,65	6,01	6,46
2012	5,04	6,34	6,23

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2012 sebesar 6,34%. Demikian juga bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 6,23% pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung lebih rendah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung sebagaimana daerah agraris lainnya cukup rendah. Daerah agraris pada umumnya pertumbuhan ekonominya lebih rendah daripada daerah industri namun pertumbuhannya lebih merata. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se wilayah karesidenan Kedu, maka Kabupaten Temanggung menempati posisi ketiga, yaitu setelah Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo.

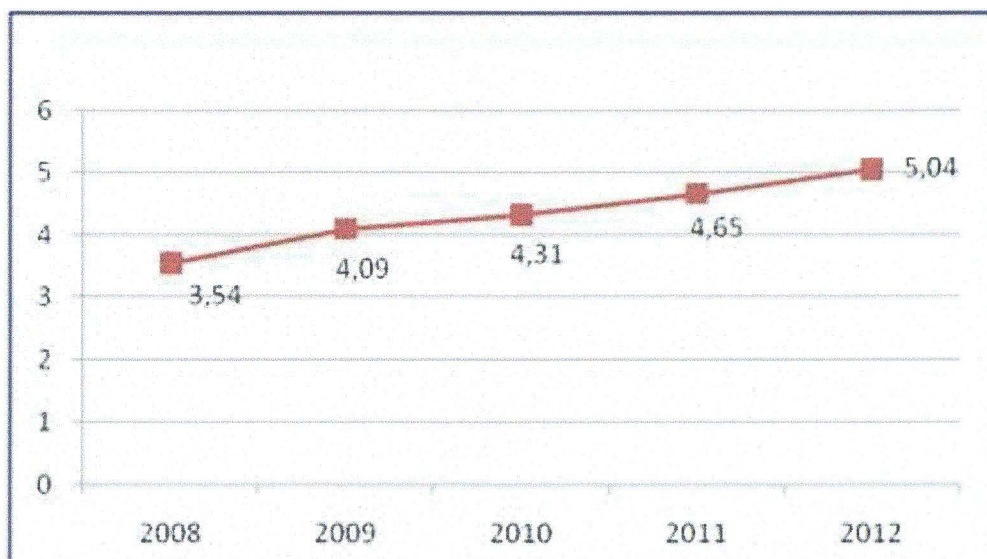
TABEL: 3.12. PERTUMBUHAN EKONOMI PER SEKTOR KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008-2012

Sektor	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian	- 1,07	6,14	3,66	0,70	5,11
2. Pertambangan dan Penggalian	5,38	0,38	-5,76	-6,58	-9,44
3. Industri Pengolahan	3,89	2,03	3,78	6,28	4,36
4. Listrik dan Air Bersih	6,62	4,35	8,86	5,76	9,14
5. Bangunan	5,57	2,91	2,80	5,31	8,21
6. Perdagangan, Hotel dan RM	4,58	3,72	3,74	4,74	4,50
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,87	4,26	6,20	9,72	4,92
8. Keuangan, Persw. dan Jasa Perusahaan	4,38	3,66	4,10	7,37	5,75
9. Jasa-jasa	10,03	3,81	7,29	8,18	5,61
Pertumbuhan Ekonomi	3,54	4,09	4,31	4,65	5,04

Sumber: RKPd Kabupaten Temanggung Tahun 2015

Pada tabel 3.12 diperlihatkan laju pertumbuhan seluruh sektor ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2012 hampir semua sektor tumbuh positif kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami pertumbuhan minus 9,44% dikarenakan berkurangnya aktivitas pertambangan dan penggalian. Berkurang aktivitas tersebut dikarenakan ditutupnya beberapa lokasi penambangan pasir yang ada di Kabupaten Temanggung karena dipandang sudah mencapai tahap membahayakan lingkungan di sekitar penambangan. Dari delapan sektor yang mengalami pertumbuhan positif, ada lima sektor yang mengalami pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung yang sebesar 5,04%. Kelima sektor tersebut adalah sektor Listrik dan Air Bersih yang mencapai 9,14%, sektor Bangunan sebesar 8,21%, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5,75%, sektor Jasa-jasa 5,61% dan sektor Pertanian 5,11%.

Untuk tiga sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan positif tetapi di bawah rata-rata pertumbuhan kabupaten adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi 4,92%, sektor Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan 4,5% dan sektor Industri Pengolahan sebesar 4,36%. Sektor Pertanian pada tahun 2012 tumbuh sebesar 5,11% lebih tinggi daripada tahun 2011 yang tumbuh sebesar 0,70%. Naiknya pertumbuhan sektor Pertanian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung, karena sektor ini memberikan kontribusi terbesar sebanyak 32,57%. Bila di tahun 2011 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sub sektor Kehutanan yang mencapai 10,77%, pada tahun 2012 sub sektor ini justru mengalami pertumbuhan negatif yaitu minus 8,24%.



GAMBAR : 3.7. PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN TEMANGGUNG

d. Struktur Ekonomi Daerah

Tahun 2008-2012 Dalam periode waktu lima tahun terakhir, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan masih merupakan sektor andalan bagi perekonomian Kabupaten Temanggung, karena keduanya memberikan kontribusi terbesar dalam penyusunan PDRB. Hal ini dapat dilihat pada persentase distribusi PDRB menurut sektor baik menurut harga berlakumaupun harga konstan, dimana sektor pertanian menyumbang di atas 30% dari nilai total PDRB dan sektor industri pengolahan memberikan kontribusi lebih dari 17%. Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 – 2012 dapat dilihat pada tabel 3.13.

TABEL: 3.13. STRUKTUR EKONOMI ATAS DASAR HARGA BERLAKU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008-2012

Sektor	Tahun (%)				
	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian	30,82	31,86	33,11	32,75	32,57
2. Pertambangan dan Penggalian	1,19	1,16	1,05	0,96	0,86
3. Industri Pengolahan	19,11	18,45	17,68	17,26	17,61
4. Listrik dan Air Bersih	1,03	1,04	1,05	1,05	1,06
5. Bangunan	5,81	5,77	5,60	5,52	5,60
6. Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan	16,78	16,74	16,65	16,63	16,63
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,67	5,48	5,23	5,28	5,16
8. Keuangan,Persewaan dan Jasa Perush.	4,25	4,16	4,11	4,23	4,19
9. Jasa-jasa	15,34	15,34	15,52	16,32	16,32
PDRB	100	100	100	100	100

Pada tahun 2012, sumbangan terbesar untuk PDRB atas dasar harga berlaku adalah dari sektor pertanian sebesar 32,57%. Pada tahun 2012 peran sektor pertanian mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena di tahun 2011 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 32,75%. Kontribusi terbesar kedua diberikan oleh sektor industri pengolahan 17,61% dan diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan rumah makan dengan memberikan andil sebesar 16,63%. Sumbangan terkecil adalah dari sektor pertambangan dan penggalian yakni sebesar 0,86%. Dari distribusi antar sektor terlihat bahwa ke sembilan sektor selama lima tahun terakhir memperlihatkan peranannya dari waktu ke waktu terhadap total PDRB. Kontribusi sektor Pertanian, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kecenderungan menurun dalam dua tahun terakhir. Sedangkan kontribusi sektor Industri Pengolahan, sektor Bangunan, dan sektor Listrik dan Air Bersih cenderung meningkat walaupun dengan peningkatan yang relatif kecil. Secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang berarti.

e. Inflasi

Laju inflasi menunjukkan perkembangan indeks harga konsumen atau mencerminkan kestabilan nilai tukar rupiah. Perkembangan inflasi di Kabupaten Temanggung sangat dipengaruhi berbagai faktor eksternal di luar kendali Pemerintah Daerah. Perkembangan harga barang dan jasa di Temanggung tidak terlepas dari kondisi perkembangan harga di tingkat nasional maupun regional.

TABEL: 3.14. PERKEMBANGAN LAJU INFLASI KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA TENGAH DAN NASIONAL TAHUN 2008-2012

Tahun	Temanggung	Jawa Tengah	Nasional
2008	12,36	9,55	11,06
2009	4,16	3,32	2,78
2010	7,35	6,88	6,96
2011	2,42	2,68	3,79
2012	4,73	4,24	4,30

Selama periode 2008-2012, perkembangan laju inflasi di Kabupaten Temanggung tercatat pada tabel 2.33. Laju inflasi tahun 2012 hampir dua kali besarnya jika dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2012 dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,24% dan inflasi nasional sebesar 4,3% maka angka inflasi Temanggung masih lebih rendah. Sedangkan untuk Tahun 2012, inflasi di Kabupaten Temanggung sebesar 4,73% dan jika dibandingkan dengan inflasi provinsi dan nasional maka angka inflasi di Kabupaten Temanggung relatif lebih tinggi. Dari ketujuh kelompok pengeluaran yang menjadi acuan inflasi, nilai tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran makanan jadi sebesar 10,55% kemudian sandang 4,94%. Kelompok pengeluaran dengan tingkat inflasi terendah pada transportasi yaitu sebesar 0,02%.

f. Nilai Investasi

Yang dimaksud jumlah nilai investasi PMDN/PMA dihitung berdasarkan atas persetujuan dan besaran investasi yang direalisasikan di daerah. Jumlah persetujuan investasi dihitung dengan menjumlahkan nilai proyek investasi PMDN berskala nasional dan nilai proyek investasi PMA berskala nasional yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal investasi riil adalah banyaknya investasi PMDN berskala nasional dan banyaknya investasi PMA berskala nasional yang telah terealisasi pada suatu periode tahun tertentu. Pada tahun 2011 nilai investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Asing rupiah. Adapun nilai investasi PMDN tahun 2009-2013 dapat dilihat dalam tabel 3.15.

TABEL: 3.15. NILAI INVESTASI PMDN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008-2013

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Investor	Nilai Investasi (M)	Jumlah Investor	Nilai Investasi (M)
2008	82	123,213	82	123,213
2009	78	38,334	78	38,334
2010	283	25,316	283	25,316
2011	247	10,953	247	10,953
2012	503	123,457	503	123,457
2013	181	85,692	181	85,692
Jumlah	1.291	283,752	1.291	283,752

Sumber : KPPPM Kabupaten Temanggung, 2013

Dari tabel tampak bahwa realisasi nilai investasi adalah sama besar dengan persetujuan investasinya. Nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah sebanyak 503 investasi dengan nilai sebesar 123,457 milyar. Sedangkan nilai investasi terendah terjadi pada tahun 2009 dengan jumlah sebanyak 78 investasi dengan nilai sebesar 38,334 milyar. Pada tahun 2008 terjadi nilai investasi yang termasuk besar karena dengan jumlah investor 82 nilai investasinya 123,213 hal ini karena banyaknya usaha industri pengolahan kayu yang mengajukan perpanjangan dan berdiri pada tahun 2008.

g. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Hal ini dapat ditempuh dengan pembangunan yang menitikberatkan pada masalah perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Ditambah ulasan tentang keterkaitan tenaga kerja sebagai faktor produksi dalam rangka peningkatan ekonomi. Jumlah angkatan kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2013 sejumlah 437.543 orang, yang bekerja sebanyak 96,23% dan pengangguran 3,77%.

Sampai tahun 2103 sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja sebesar 53%, kemudian disusul oleh sektor jasa 10,90% dan yang ketiga adalah industri 10,60%.

3.1.4. INSIDENSI SAKIT

Sepuluh besar jenis penyakit Kabupaten Temanggung yang tercatat di 4 (empat) Rumah Sakit adalah diare yaitu sebanyak 1.721 pasien yang rawat inap di rumah sakit (30,51 %), peringkat kedua cedera kepala ringan sebanyak 895 orang (15,87 %), dan peringkat ketiga adalah penyakit Febris Typhoid sebanyak 678 orang (12,02 %).

Penyakit diare dapat menyerang siapa saja dalam anggota keluarga tanpa pandang bulu. Mulai dari balita, anak-anak, anak remaja laki-laki, anak remaja perempuan, orang dewasa laki-laki, orang dewasa perempuan. Balita merupakan usia yang cukup rawan untuk terserang penyakit diare. Besaran kejadian penyakit diare dapat diindikasikan kurang memenuhinya sarana sanitasi yang ada di masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL: 3.16. REKAPITULASI 10 PENYAKIT BESAR SE-KABUPATEN TEMANGGUNG (RAWAT INAP DI RS)

NO	JENIS PENYAKIT	RAWAT INAP	%
1	Diare	1.721	30,51
2	Cedera Kepala Ringan	895	15,87
3	Febris Typhoid	678	12,02
4	Hipertensi	532	9,43
5	DHF (Demam Berdarah)	422	7,48
6	Stroke	369	6,54
7	Gastritis	304	5,39
8	AMI (Akut Myocard Infark)	260	4,61
9	Infeksi Saluran Kencing	238	4,22
10	Infeksi Virus	221	3,92
	JUMLAH	5.640	100,00

Sumber : Buku Putih Sanitasi Temanggung, 2013

3.2. POTENSI AIR PERMUKAAN

3.2.1. POTENSI AIR SUNGAI

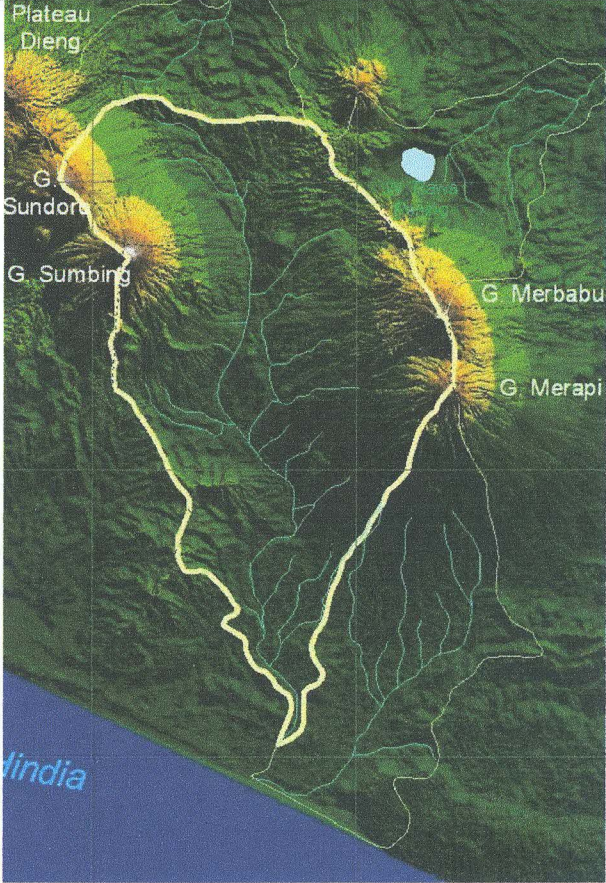
Air permukaan adalah air yang berada di permukaan tanah dan dapat dengan mudah dilihat oleh mata kita. seperti laut, sungai, danau, rawa-rawa dan lain sebagainya. Air permukaan adalah air yang berada di permukaan tanah dan dapat dengan mudah dilihat oleh mata kita. seperti laut, sungai, danau, rawa-rawa dan lain sebagainya.

Sistem jaringan sumber daya air yang diarahkan pada konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang terdiri atas WS (Wilayah Sungai) meliputi:

- a. WS Progo-Opak-Serang yang merupakan WS lintas provinsi;
- b. WS Bodri-Kuto yang merupakan WS lintas kabupaten;
- c. WS Serayu-Bogowonto yang merupakan WS lintas kabupaten;
- d. DAS pada WS Progo-Opak-Serang berupa DAS Progo;
- e. DAS pada WS Bodri-Kuto berupa DAS Bodri;
- f. DAS pada WS Serayu-Bogowonto berupa DAS Serayu.

TABEL: 3.17. POTENSI DAN DESKRIPSI DAS DI KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama DAS	Diskripsi
1	DAS Progo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara administratif DAS Progo terletak di Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas DAS Progo \pm 2.421 km², dengan panjang sungai utamanya \pm 138 km. Debit rerata bulanan Sungai Progo tercatat di beberapa tempat yaitu di Kali Bawang 58,50 m³/dt, di Duwet 44,78 m³/dt, di Badran 17,6 m³/dt dan di Borobudur 30,30 m³/dt. Sedangkan debit maximum yang tercatat di Stasiun Duwet sebesar 213,00 m³/dt dan minimum 1,06 m³/dt, di stasiun Kalibawang tercatat maksimum sebesar 331 m³/dt dan minimum sebesar 12,00 m³/dt. Stasiun Badran maksimum 103 m³/dt dan minimum 5,76 m³/dt, Stasiun Borobudur maksimum 205 m³/dt dan minimum 6,56 m³/dt. (Sumber: Kepmen PU No. 590/KPTS/M/2010 Pola Pengelolaan SDA WS Progo-Opak-Serang). ▪ Curah hujan tahunan di DAS Progo bervariasi dari 1659 mm/tahun (Badran) sampai 4573 mm/tahun (Kintelan). Gunung Sundoro (4000 – 6500 mm/tahun), dan di lereng Gunung Merapi (3500 – 4500 mm/tahun). Daerah hilir dari DAS Progo mempunyai curah hujan antara 2000 – 3000 mm/tahun

No	Nama DAS	Diskripsi
		
2	DAS Bodri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sungai Bodri merupakan ujung dari beberapa anak sungai yaitu sungai Logung, Sungai Toroh, Sungai Lutut dan Sungai Putih yang mempunyai luas Daerah Pengaliran Sungai (DPS) ± 459 km² dengan total panjang ± 41 km. ▪ Hulu sungai Bodri berada di gunung Sumbing, umumnya dataran tinggi dengan lembah yang curam, di bagian tengah dan hilir relatif datar juga bersumber air di pegunungan Sumbing bermuara di Laut Jawa melalui sungai Bodri Debit Sungai Bodri Terendah pada bulan September 2012 = 3,02 m³/dt dan Tertinggi pada bulan Januari 2012 = 68,49 m³/dt.

No	Nama DAS	Diskripsi
		<p>PETA DAS BODRI BALAI PSDA JRAGUNG TUNTANG</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stat_Kematologi Curah_hujan Bendung Sungai Anak_Sungai Paralel Jalan Jalan_KA Batas_Desa Batas_kecamatan Batas_Kabupaten DAS_Kendal DAS_Bodri DAS_Bulanan DAS_Blorong

Sumber: Kepmen PU 590/KPTS/M/2010 dan Kepmen PU 588/KPTS/M/2010, Data diolah 2015

TABEL: 3.18. PEMBAGIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PANJANG DAN DEBIT AIR DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DAS	Sub DAS	Sub-sub DAS	Luas (Ha)	Panjang Sungai (km)	Debit (m ³ /dtk)	
1	2	3	4	5	6	
DAS Serayu	Sub DAS Begaluh					
	Sub DAS Putih					
TOTAL DAS SERAYU			202.66			
DAS Progo	Sub DAS Tangsi	Sub-Sub DAS Plumbon	3,010.51	238.29		
		Sub DAS Lunge	5,058.68	253.97		
		Total Sub DAS Tangsi	8,069.19	492.26	4,889	
	Sub DAS Elo	Sub-sub DAS Elo	2,421.19	54.55		
		Sub-sub DAS Murung	7,267.37	260.94		
		Sub-sub DAS Tingal	9,145.62	329.75		
			Total Sub DAS Elo	18,834.18	645.24	5,556
	Sub DAS Progo Hulu	Sub-sub DAS Kuas	6,960.70	368.47		
		Sub-sub DAS Galeh	11,298.35	602.07		
		Sub-sub DAS Hulu Progo	8,948.73	436.17		
		Sub-sub DAS Grabah	3,167.97	182.22		
			Total Sub DAS Hulu Progo	30,375.75	1,588.93	6,100
	TOTAL DAS PROGO			57,279.12	2,726.43	16,545
DAS Bodri	Sub DAS Logung	Sub-sub DAS Logung	5,509.06	231.2		
	Sub DAS Lutut	Sub-sub DAS Lutut	11,392.10	555.6		
		Sub-sub DAS Pupu	6,640.63	351.79		
		Total Sub DAS Lutut		23,541.79	1,138.59	
	Sub DAS Putih	Sub-sub DAS Putih	6,041.43	245.37		
TOTAL DAS BODRI			29,583.22	1,383.96	*)	
TOTAL KABUPATEN			87,065.00	4,110.39		

Sumber: RTRW Kab Temanggung 2011-2013 dan RPJMD Kab Temanggung 2013-2018 data diolah



Sungai Tangsi dan Sungai Elo

Selanjutnya dari pengelompokan DAS, Sub DAS, dan Sub-sub DAS di atas dapat diperinci berdasarkan satuan sungai.

Sungai Progo merupakan sungai yang terpanjang yang melewati wilayah Kabupaten Temanggung, yaitu mencapai panjang 57 km. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Lombo yang terletak di Kecamatan Wonobojo dengan panjang 2,5 km. Perincian nama sungai dan panjang sungai disajikan pada table berikut.

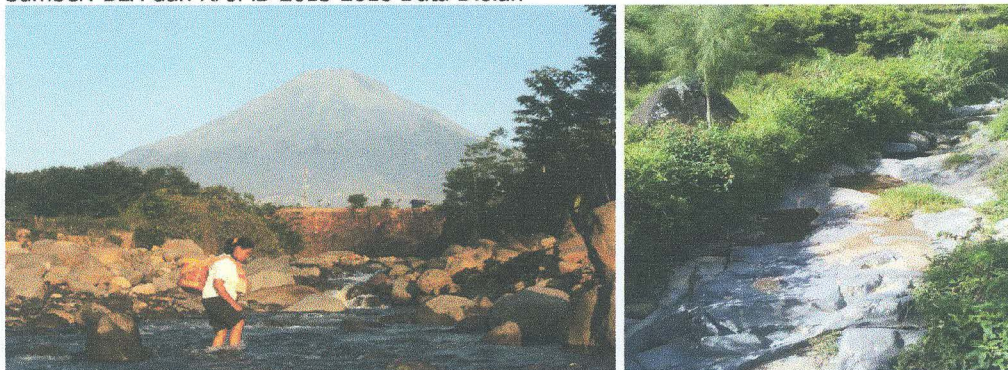
TABEL: 3.19. NAMA SUNGAI DAN PANJANG SUNGAI

No	Sungai/Kali	Panjang (Km)
1	Progo	57
2	Klegung	20
3	Sempol	10
4	Cingklong	8
5	Krengseng	5
6	Gemilang	12,5
7	Ganjuran	6
8	Celeng	8
9	Soko	8
10	Lungge	9
11	Gintung	15
12	Cuntel	6
13	Luyung	7
14	Jambe	16
15	Pacar	15
16	Tukmulyo	5
17	Parangan	17
18	Gondang	12
19	Semen	5
20	Bulu/Kuas	26
21	Tuksulon	6
22	Wates	4
23	Larangan	5,5
24	Kedu	21
25	Nongko	8,5
26	Tuksanggan	5,5
27	Tengah	6,5
28	Lingseng	4
29	Sipati	4,5
30	Kendil	5
31	Bawang	4
32	Kembang	6
33	Galeh	23
34	Gambir	4
35	Bedali	5
36	Batur	4
37	Brangkongan	11
38	Galeh Mati	5
39	Cingkru	10
40	Datar	25
41	Dandang	5
42	Putih	6,25
43	Wunut	7
44	Dongko	6,25

No	Sungai/Kali	Panjang (Km)
45	Urang	8,5
46	Bandung	13,75
47	Jenes	7
48	Guntur	15
49	Totog	7,5
50	Kuning	4,5
51	Deres	15
52	Wuluh	4
53	Bendo	4,5
54	Barang	5
55	Ceret	5
56	Langit	13
57	Muntung	4
58	Tengah	5,2
59	Sinan	6
60	Jubel	8,75
61	Sumbeng	4
62	Tapak	7,75
63	Mendeng	8,5
64	Konal	5
65	Anggrung	4,5
66	Silumbu	6,5
67	Kulon	5
68	Watu Kopyah	4,5
69	Groboh	11
70	Cantrik	5
71	Mijilan	6,5
72	Pudak	10
73	Cangkring	5
74	Pecah	7
75	Bangkong	8
76	Pakistan	6,5
77	Mlereng	12
78	Nglengeng	4,5
79	Tuksongo	5
80	Logung	10
81	Mengor	11,5
82	Glagah	11
83	Tingal	20
84	Kasinan	7
85	Setro	12
86	Krengseng	4,5
87	Nglengkong	4
88	Awar-awar	5
89	Suwukan	6
90	Gobolri	4,5
91	Kalisari	5
92	Mandang	13
93	Manden	5
94	Seleri	5
95	Wora wari	6
96	Murung	12,25

No	Sungai/Kali	Panjang (Km)
97	Elo	11
98	Bodri	40
99	Muncar	5
100	Gaheng	5
101	Kulon	4,5
102	Sisih	5
103	Kemalon	7,5
104	Sumur	6
105	Duren	3,5
106	Banjaran	6
107	Dawe/Pupus	14,5
108	Lutut	30
109	Sunggingan	11
110	Selyep	3
111	Lombo	2,5
112	Manggong	10
113	Ireng	6
114	Gede	5
115	Sapi	6
116	Gemringsing	5
117	Kepruk	5
118	Trocoh	8
119	Brejen	4,5
120	Luwungu	25
121	Brangsong	6
122	Jlegong	6
123	Ketek	6,5
124	Kajangan	4
125	Bengkat	7
126	Teguru/Logung	51
127	Turen	6
128	Dermoganti	7
129	Tukbawang	4
130	Rau	3,5
131	Paing	4
132	Tangrum	4
133	Glitung	6
134	Bono	8
	Total Panjang Sungai	1.183,95

Sumber: BLH dan RPJMD 2013-2018 Data Diolah



Jumlah mata air dan total kapasitasnya di tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL: 3.20. SUMBER AIR BAKU DI KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Kecamatan	Jumlah Sungai	Kapasitas Total (l/dtk)
1	Tretep	10	25
2	Bulu	25	73.75
3	Kedu	8	35
4	Ngadirejo	18	117.25
5	Parakan	9	2124.5
6	Tembarak	16	77.85
7	Bansari	15	50
8	Candiroto	19	1071.3
9	Kandangan	12	28.1
10	Kranggan	13	7141
11	Selopampang	16	26.43
12	Tlogomulyo	11	32.95
13	Wonoboyo	10	24.5
14	Gemawang	20	59.5
15	Temanggung	20	157
16	Jumo	6	25
17	Pringsurat	6	12
18	Kledung	17	113.7
19	Bejen	16	97
20	Kaloran	7	15.5

Sumber:

- Buku Putih Sanitasi Kab Temanggung
- Dinas PSDA Prov. Jateng

3.2.2. POTENSI AIR WADUK DAN EMBUNG ¹

A. EMBUNG KLEDUNG.

Embung Kledung dengan kapasitas volume air sekitar 19.000 meter kubik.



Embung Kledung, embung pertama di Temanggung

¹ Kledung-temanggung.blogspot.com



Embung pertama yang telah dibangun letaknya di wilayah Kecamatan Kledung, sehingga namanya terkenal dengan sebutan Embung Kledung. Embung Kledung ini dibangun di atas lahan seluas kira-kira 4 hektar. Embungnya sendiri luasnya 83 meter x 83 meter, dengan kedalaman 3 meter. Pembangunan embung ini

didanai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2010 dengan menghabiskan dana sekitar Rp. 1, 2 M.



Embung Kledung dengan latar belakang Gunung Sindoro

Di kawasan ini juga terdapat kebun teh yang cukup luas dan seni tradisional juga hidup di daerah yang terkenal dengan hasil tembakaunya ini.

B. EMBUNG DI NGLARANGAN

C. EMBUNG DI TLOGOPUCANG



Keberadaan embung di Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan, Temanggung cukup membantu peningkatan produktivitas warga setempat.

D. EMBUNG DI SOROPADAN



Embung Soropadan yang dibangun tahun 2012 pada lahan seluas 1 hektare dengan dana APBN senilai sekitar Rp 2 miliar ini diperkarakkan bisa mengairi lahan perkebunan kurang lebih 100 hektare. Selain pengairan, embung juga difungsikan untuk media

konservasi alam. Pada embung juga telah ditebar belasan kilo bibit ikan nila. Lalu ke depan lingkungan sekitarnya akan dihijaukan dengan tanaman perindang dan penahan air.

E. EMBUNG DI JETIS



Embung di Jetis Selopampang menggunakan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum. Desa Jetis selama ini dikenal sebagai desa penghasil aneka hortikultura seperti buncis perancis, beet, cabe dan sayur-sayuran lainnya. Namun bila musim kemarau terkendala

dengan tidak adanya air untuk menyiram tanaman. Oleh krena tu dengan dibangunnya embung nantinya akan dimanfaatkan sebagai pengairan untuk menyirami jenis hortikultura seperti tomat, kubis, dan sayuran lainnya.

F. EMBUNG DI NGROPOH



Embung Abimanyu terletak di Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan, merupakan embung baru yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

3.2.3. POTENSI MATA AIR

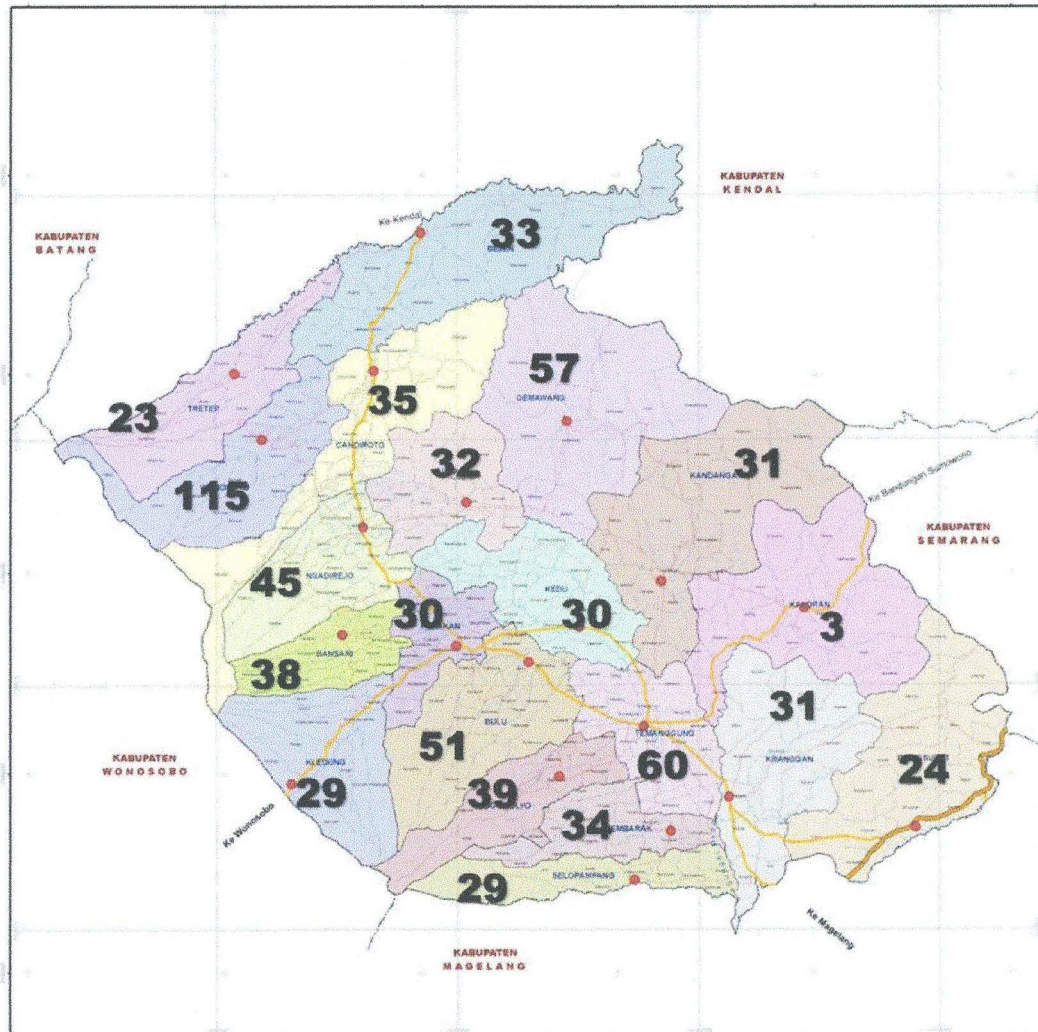
Jumlah mata air paling banyak berada di wilayah Kecamatan Wonobojo yaitu sebanyak 115 mata air sedangkan jumlah mata air paling kecil terdapat di kecamatan Kaloran. Namun demikian, kapasitas paling besar dihasilkan oleh mata air yang berada di kota Temanggung yaitu sebesar 372,05 l/dtk. Data survey tersebut berupa hasil kuisioner yang diisi oleh setiap kelurahan. Untuk kedepannya direkomendasikan untuk dilakukan validasi data ulang mengenai debit mata air maupun debit air permukaan. Validasi dilakukan karena dimungkinkan terdapat penyimpangan debit.

Jumlah mata air dan total kapasitasnya di tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL: 3.21. PERKIRAAN POTENSI SUMBER AIR BAKU DI KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Kecamatan	Jumlah Mata Air	Kapasitas Total (l/dtk)
1	2	3	4
1	Tretep	23	68.50
2	Bulu	51	249.00
3	Kedu	30	48.00
4	Ngadirejo	45	131.20
5	Parakan	30	117.50
6	Tembarak	34	77.50
7	Bansari	38	23.80
8	Candiroto	35	237.00
9	Kandangan	31	-
10	Kranggan	35	39.35
11	Selopampang	29	26.65
12	Tlogomulyo	39	35.70
13	Wonobojo	115	160.50
14	Gemawang	57	128.00
15	Temanggung	60	372.05
16	Jumo	32	52.00
17	Pringsurat	24	33.00
18	Kledung	29	302.00
19	Bejen	33	109.00
20	Kaloran	3	6.50
Jumlah		773	2,217.25

Sumber: Buku Putih Sanitasi Kab Temanggung



Sumber: Buku Putih Sanitasi Kab Temanggung

GAMBAR : 3.8. JUMLAH DAN SEBARAN MATA AIR DI TIAP KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Berdasarkan data sumbermata air yang sudah di verivikasi PDAM Tirta Agung Kabupaten Temanggung, maka terdapat 36 (3 lokasi mata air terdapat diluar wilayah administasi Kabupaten Temanggung). Alokasi mata air terdapat di 9 kecamatan, dengan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Bulu sejumlah 11 mata air. Total kapasias debit diperkirakan ± 714 Lt/Dtk.

Lihat Tabel 3.22.

TABEL: 3.22. DATA MATA AIR PDAM "TIRTA AGUNG" KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama Sumber Air	Luas Lahan (m ²)	Debit (L/Dt)		Lokasi		
			Sumber	Terpasang	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Mata air Tuk Mulyo	15,000	79	55	Pandemulyo	Bulu	Temanggung
2	Mata Air Semadu 1	335	23	23	Campursari	Bulu	Temanggung
3	Mata Air Semadu 2	300	12	8	Gandurejo	Bulu	Temanggung
4	Mata Air Sucen 1	142	11	11	Gandurejo	Bulu	Temanggung
5	Mata Air Sucen 2	600	4	0	Gandurejo	Bulu	Temanggung
6	Mata Air Sekayon 1	770	10	7	Gandurejo	Bulu	Temanggung
7	Mata Air Sekayon 2	600	4	4	Gandurejo	Bulu	Temanggung
8	Mata Air Sebayan 1	460	4	2	Gandurejo	Bulu	Temanggung
9	Mata Air Sebayan 2	473	3	2	Gandurejo	Bulu	Temanggung
10	Mata Air Bujet 1	470	5	4	Gandurejo	Bulu	Temanggung
11	Mata Air Bujet 2	1,130	5	0	Gandurejo	Bulu	Temanggung
12	Mata Air Sekenci - Galeh	200	5	0	Kauman	Parakan	Temanggung
13	Mata Air Segandang, Tlahab	384	85	59	Tlahab	Kledung	Temanggung
14	Mata Air Sigandul	150	8	11	Tlahab	Kledung	Temanggung
15	Mata Air Tuk Sewu 1	148	25		Kruwisan	Kledung	Temanggung
	Mata Air Tuk Sewu 2	300	20	20	Petrangan	Kledung	Temanggung
17	Mata Air Segaran	185	15	15	Canggal	Kledung	Temanggung
18	Mata Air Sigetuk	320	36	15	Pringapus	Ngadirejo	Temanggung
19	Mata Air Tempurung		20	12	Purbosari	Ngadirejo	Temanggung
20	Mata Air Jumprit		135	55	Tegalrejo	Ngadirejo	Temanggung
21	Mata Air Tloyo	235	15	0	Karanggedong	Ngadirejo	Temanggung
22	Mata Air Pikatan		63	32	Mudal	Temanggung	Temanggung
23	Mata Air Giyanti	190	10	0	Gyanti	Temanggung	Temanggung
24	Mata Air Sedandang, Tanggulanom		35	17	Tanggul Anom	Selopampang	Temanggung
25	Mata Air Tuk Bening	1,574	40	25	Klepu	Pringsurat	Temanggung
26	Mata Air Ngasinan 1	46	4	3	Rejosari	Pringsurat	Temanggung
27	Mata Air Ngasinan 2	265	6	4	Rejosari	Pringsurat	Temanggung
28	Mata Air Ngasinan 3	262	9	8	Rejosari	Pringsurat	Temanggung
29	Mata Air Ngasinan 4	60	3	0	Rejosari	Pringsurat	Temanggung
30	Mata Air Ngasinan 5	100	5	0	Rejosari	Pringsurat	Temanggung
	Mata Air Mudal	144	8	5	Karangwuni	Pringsurat	Temanggung
32	Mata Air Segedang	16	4	5	Karangwuni	Pringsurat	Temanggung
33	Mata Air Pucung*		13	8	Ngrancah	Grabag	Magelang
34	Mata Air Tuk Kebo*	98	8	0	Gunungsari	Windusari	Magelang
35	Mata Air Dempel*	1,008	6	6	Candigaron	Sumowono	Semarang
36	Mata Air Tu Areng		3	3	Dlimoyo	Ngadirejo	Temanggung

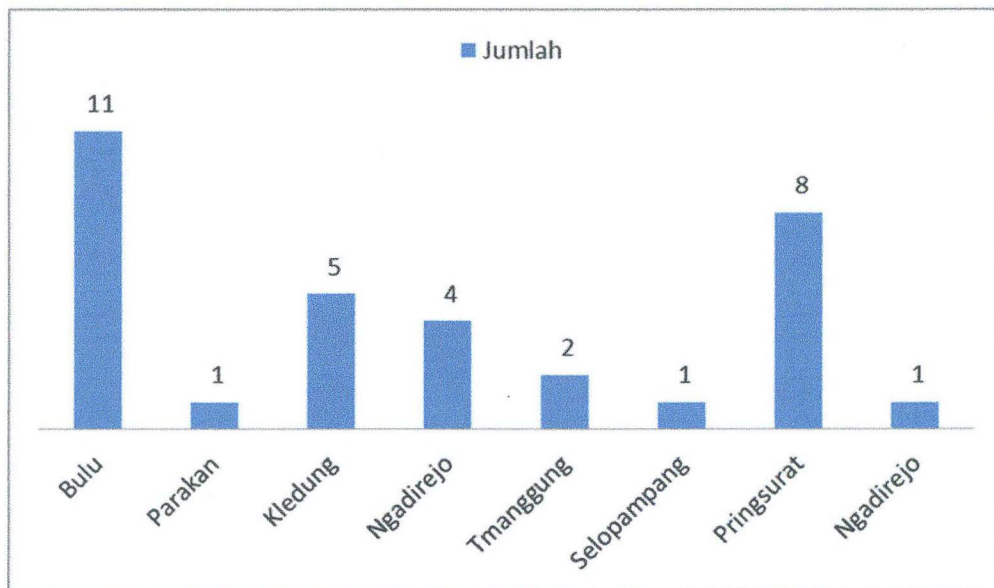
1. : Berada di luar administrasi Temanggung

Sumber: PDAM Tirta Agung Tahun 2015, Data Diolah

TABEL: 3.23. JUMLAH DAN DEBIT SUMBER DARI MATA AIR

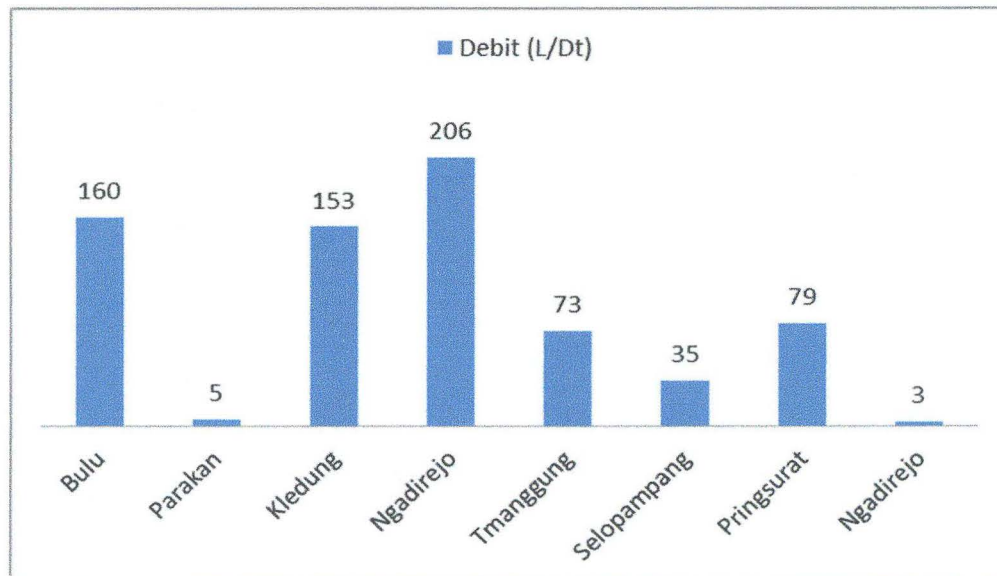
Kecamatan	Jumlah	Debit (L/Dt)
Bulu	11	160
Parakan	1	5
Kledung	5	153
Ngadirejo	4	206
Tmanggung	2	73
Selopampang	1	35
Pringsurat	8	79
Ngadirejo	1	3
Total/Jumlah	33	714

Sumber: PDAM Tirta Agung Tahun 2015, Data Diolah



Sumber: PDAM Tirta Agung Tahun 2015, Data Diolah

GAMBAR : 3.9. JUMLAH MATA AIR DI TIAP KECAMATAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG



Sumber: PDAM Tirta Agung Tahun 2015, Data Diolah

GAMBAR : 3.10. KAPASITAS AIR MATA AIR DI TIAP KECAMATAN

3.2.4. POTENSI AIR TANAH

Air tanah dibedakan atas letak kedalamannya, yaitu:

1. Air tanah dangkal, yaitu air tanah yang berada di bawah permukaan tanah dan berada di atas batuan yang kedap air atau lapisan yang tidak dapat meloloskan air. Air ini merupakan akuifer atas atau sering disebut air freatis, banyak dimanfaatkan oleh penduduk untuk membuat sumur.
2. Air tanah dalam, yaitu air tanah yang berada di bawah lapisan air tanah dangkal, dan berada di antara lapisan kedap air. Air ini merupakan akuifer bawah, banyak dimanfaatkan sebagai sumber air minum penduduk kota, untuk industri, perhotelan, dan sebagainya.

Berdasarkan sumber RTRW Kabupaten CAT terdiri atas :

2. CAT Magelang-Temanggung

CAT Magelang-Temanggung dengan luas minimal 2.342 hektar yang meliputi wilayah :

- a. Kecamatan Parakan
- g. Kecamatan Kledung
- h. Kecamatan Bansari
- i. Kecamatan Bulu
- j. Kecamatan Temanggung
- k. Kecamatan Tlogomulyo
- l. Kecamatan Tembarak
- m. Kecamatan Selopampang
- n. Kecamatan Kranggan

- o. Kecamatan Pringsurat
- p. Kecamatan Kaloran
- q. Kecamatan Kandangan
- r. Kecamatan Kedu
- s. Kecamatan Ngadirejo
- t. Kecamatan Jumo
- u. Kecamatan Gemawang

1. CAT Subah

CAT Subah dengan luas minimal 273 hektar yang meliputi wilayah :

- a. Kecamatan Tretep
- b. Kecamatan Wonobojo
- c. Kecamatan Candirot

2. CAT Sidomulyo

CAT Sidomulyo dengan luas minimal 633 hektar yang meliputi wilayah :

- a. Kecamatan Bejen
- b. Kecamatan Candirot
- c. Kecamatan Gemawang
- d. Kecamatan Kandangan

Kondisi hidrogeologi di Kabupaten Temanggung terdiri empat jenis. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung kondisi hidrogeologinya berupa akuifer produktif. Dengan kondisi tersebut Kabupaten Temanggung termasuk dalam Kabupaten yang memiliki persediaan sumber daya air yang melimpah.

3.3. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Isu strategis dan Permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM kota Palembang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

3.3.1. PERKOTAAN / PDAM TIRTA AGUNG

- 1) Kekurangan yang didapat dalam unit produksi ini, yaitu belum terpasangnya unit meter induk produksi yang berfungsi untuk menghitung volume air yang dihasilkan sehingga perhitungan jumlah kehilangan air belum diperoleh lebih akurat. Selanjutnya, saat ini unit produksi yang dimiliki oleh PDAM Kabupaten Temanggung kapasitas produksi yang terpasang telah dimanfaatkan seluruhnya. Kondisi ini mengharuskan PDAM melakukan penambahan unit produksi dalam upaya meningkatkan jumlah pelanggan.

Disamping itu, faktor internal unit produksi yang merupakan kelemahan yang saat ini dimiliki PDAM Kabupaten Temanggung adalah terbatasnya jumlah ketersediaan air baku yang ada. Hal ini membuat kesulitan PDAM Kabupaten Temanggung dalam upayanya meningkatkan jumlah pelanggan.

- 2) Kondisi pipa transmisi untuk Kota Temanggung dari BPT 7 s/d BPT 8 sudah overload dan perlu untuk diparalel. Pada bagian berikutnya, yaitu di kegiatan distribusi, PDAM Kabupaten Temanggung saat ini memiliki jaringan pipa distribusi yang kondisinya sudah mengalami kerusakan. Pipa ACP dan pipa dinas GIP yang mengalirkan air kepada pelanggan banyak mengalami kebocoran.
- 3) Rasio pegawai-sambungan sangat rendah, yaitu 3,3 untuk 1.000 pelanggan. Selanjutnya, Organisasi yang dijalankan diisi oleh 54,1% yang bekerja di bagian teknik dan latar belakang pendidikan pegawai yang relatif tinggi juga menunjukkan kekuatan aspek internal yang dimiliki PDAM Kabupaten Temanggung.
- 4) Aspek pelayanan yang belum memberikan kekuatan PDAM adalah belum adanya Forum Komunikasi Pelanggan.
- 5) Konflik pemanfaatan sumber air dengan kebutuhan jaringan irigasi.

3.3.2. PERDESAAN NON PDAM

- 1) Demikian juga pelayanan air minum dari PDAM bagi masyarakat Kabupaten Temanggung masih terbatas yaitu baru melayani 9 (sembilan) kecamatan dari 20 (dua puluh) kecamatan yang ada. Sebagian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air minum mengambil dari air tanah/ sumur gali atau dari mata air yang ada di sekitar permukiman warga.
- 2) Keterbatasan sumber air dengan adanya penurunan debit sumber air terutama pada musim kemarau.
- 3) Kondisi krisis air bersih pernah terjadi di 42 dusun di 18 desa yang tersebar di enam kecamatan, yakni Gemawang, Bulu, Jumo, Kandangan, Kaloran, dan Kranggan. Namun, daerah kekeringan bertambah terjadi di 45 dusun, 19 desa, di tujuh kecamatan.
- 4) Kendala kepemilikan lahan yang merupakan lokasi akan sumber air bersih.
- 5) Mata air/ sumber air yang merupakan jalur lintas wilayah desa.
- 6) Sumber air kadang terjadi konflik dengan kepentingan jaringan irigasi.
- 7) Kondisi teknis jaringan pipa yang mengganggu / cross pada saluran drainase / sungai.
- 8) Perbedaan pengelolaan aset masing-masing desa penerima program pamsimas.

- 9) Belum optimalnya kinerja Badan Pengelola Sarana (BPS) Program Pamsimas di Kabupaten Temanggung dalam mengelola aset
- 10) Rendahnya biaya rata-rata iuran / tarif tiap m³ ($\pm 1000 / m^3$), menyebabkan biaya perawatan akan jaringan dan infrastruktur air bersih menjadi minim.
- 11) Perlu diperbanyak program-program pembiayaan dan kelembagaan seperti. Kerja sama dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan bagi SPAM perdesaan telah dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 melalui program Peningkatan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Berbasis Masyarakat (Upgrading Community Based Water Piped Supply through Private Sector atau Second Generation Project (SGP). kerja sama dilakukan dengan melibatkan Water and Sanitation Program (WSP) - World Bank, Indonesia Infrastruktur Initiative (IndII) - AUSAid, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian PU. Di Kabupaten manggung baru ada 18 desa yang merupakan program percontohan (pilot project).

3.4. TANTANGAN PEGEMBANGAN SPAM

3.4.1 Faktor Internal

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar diantaranya:

- a) Meningkatkan cakupan pelayanan menjadi 100 % air minum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan melalui SPAM perpipaan dan non perpipaan yang aman sesuai dengan kualitas yang disyaratkan;
- b) Mengoptimalkan potensi dalam hal pendanaan Penyelenggaraan SPAM, antara lain:
 - ✍ sumber dana dari perbankan nasional, donor (hibah/grant), swasta (CSR), dan dana masyarakat (obligasi) yang belum termanfaatkan serta mobilisasi dana daerah;
 - ✍ Tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang professional dengan penerapan "good corporate governance" dan mengembangkan teknologi pengolahan air yang lebih efisien;
 - ✍ Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan MDG's 2015 target RPJMN 2019 dan universal akses pada tahun 2025.

3.4.2 Faktor Eksternal

Tantangan eksternal kedepan Kabupaten Temanggung antara lain :

- ❖ Melaksanakan pembangunan SPAM yang berkelanjutan;
 - ❖ Menerapkan *Good Governance*;
 - ❖ Meningkatkan iklim investasi yang kompetitif;
 - ❖ Komitmen terhadap MDGs dan Capaian secara Nasional tahun 2019.
 - ❖ Pengembangan SPAM berwawasan lingkungan dan konservasi;
-

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

Bab

4



4.1. SKENARIO PENYELENGGARAAN SPAM

KSDP (Kebijakan Strategi dan Pengembangan) - SPAM Kabupaten Temanggung mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

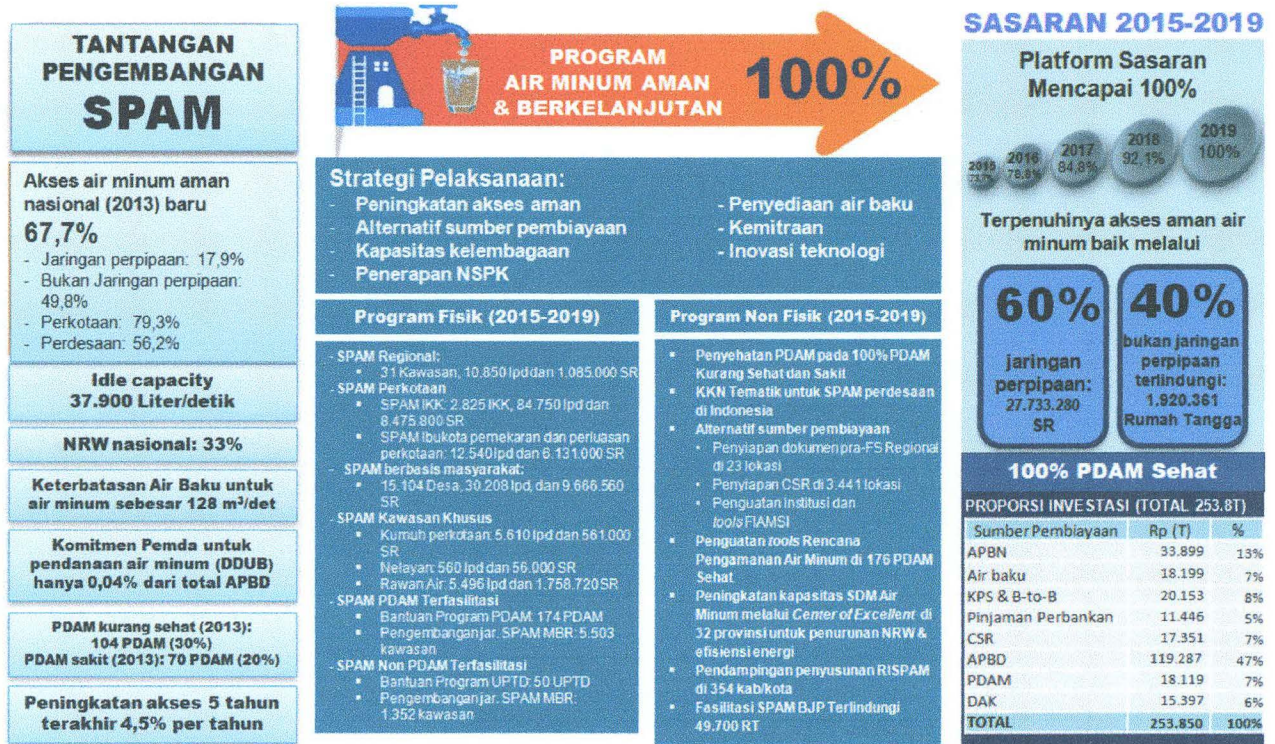
- a. Pencapaian MDGs tahun 2015 yaitu sebesar 68,87% penduduk Indonesia akan memperoleh akses air minum yang aman pada tahun 2015, dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 75,29% dan perdesaan sebesar 65,81%;

TABEL: 4.1. TARGET CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM 2015-2025

Cakupan dan Target	2011*	2014	2015	2020	2025
Cakupan RPJMN		70			
– Cakupan RPJMN Perpipaan (%)		32			
– Cakupan RPJMN Non Perpipaan (%)		38			
Cakupan MDGs-Nasional (%)	55,04		68,87		
– Cakupan MDG Perkotaan (%)	52,16		75,29		
– Cakupan MDG Perdesaan (%)	57,87		65,81		
Cakupan MDG- Perpipaan (%)	27,05		41,03		
– Cakupan MDG- Perpipaan Perkotaan (%)	41,88		68,32		
– Cakupan MDG- Perpipaan Perdesaan (%)	13,94		19,76		
Cakupan MDG-Non pipa Terlindungi (%)	24,32		27,84	25,97	20,97
Cakupan Nonpipa Tidak Terlindungi (%)			31,13	15,00	0,00
Cakupan MDG Akses Aman Nasional (Juta Jiwa)			176,2	234,2	296,7
Target Pelayanan Air Minum Nasional				85	100
– Cakupan Perkotaan (%)				95	100
– Cakupan Perdesaan (%)				75	100

Sumber : Target MDGs

- b. SPM tahun 2019 sebesar 81,7% dikoreksi dengan RPJMN menjadi 100%;



GAMBAR : 4.1. PROGRAM AIR MINIM AMAN BERKELANJUTAN 2015-2019

- c. Sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RISPAM dan /Business Plan PDAM;

- Cakupan Layanan Air Minum yang layak Pada tahun 2018 91,3 % Akses air minum aman (RPJMD kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018)
- Pada tahun 2019 100% (dengan dari sasaran RISPAM 60% jaringan perpipaan dan 40% non perpipaan terlindungi)
- Pada tahun 2018 Akses air minum aman oleh PDAM Peningkatan cakupan pelayanan menjadi 21,5% % (Business Plan PDAM).

- d. Berdasarkan butir a, b dan c sasaran yang harus di capai pada tahun 2019 adalah 100% akses air minum aman baik melalui JP oleh PDAM, Swasta dan kelompok masyarakat, maupun BJP terlindungi oleh masyarakat dengan scenario.

- JP oleh PDAM 25 %
- JP oleh Swasta dan Pokmas 35 %
- BJP terlindungi oleh Masyarakat 40%

4.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD 2018 dan sasaran MDG's 2015, serta sasaran RPJMN 2019. Adapun arahan kebijakan adalah:

- a) Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
- b) Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan Penyelenggaraan alternative sumber pembiayaan;
- c) Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM;
- d) Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di Pusat dan di Daerah;
- e) Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
- f) Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat;
- g) Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM.

4.2.1. KEBIJAKAN

Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

A. Strategi 1

Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk *memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah* strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. *Mengembangkan SPAM* dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung Tahun 2011 – 2031 (Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 01 Tahun 2012).
2. *Membangun SPAM* baru untuk pusat perkotaan dan perdesaan terutama untuk kawasan atau daerah rawan air / kekeringan, rawan penyakit, dan yang belum terjangkau layanan (Dinas PU, Bappeda, Bapermasdes, Dinas Kesehatan dan PDAM).
3. Menambah jumlah pelanggan dan peningkatan kualitas pada wilayah pelayanan yang sudah ada (pada Kecamatan Bangsri, Bajen, Tretep dan Wonobojo)

4. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masyarakat miskin di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan perdesaan. (PDAM, PUSAT).
5. Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat. (Pokja AMPL, PU)
6. Mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan SPAM di kawasan rawan kekeringan.

B. Strategi 2

Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain untuk kebutuhan industri, niaga dan pariwisata. (PDAM)
2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. (PDAM)
3. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan perkotaan dan kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga (PDAM dan PU).

C. Strategi 3

Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi, melalui program stimulan, percontohan dan dana bergulir. (Dinas PU)
2. Melaksanakan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. (Dinas PU)
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan sanitarian. (PU, BLH dan Dinas Kesehatan)
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat kerja sama lintas instansi pemerintah (Pokja AMPL).

D. Strategi 4

Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menegakkan kontrol kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat. (Dinas Kesehatan, PDAM)
2. Melakukan pembinaan kepada penyelenggara PDAM dan non PDAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan SKPD yang membidangi pengawasan kualitas air dan pemanfaatan sanitarian. (Dinas Kesehatan)
3. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum.
4. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*). (Dinas PU)

E. Strategi 5

Menurunkan tingkat kehilangan air. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air.(Pusat dan PDAM)
2. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.
3. Memberikan disinsentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki tingkat kehilangan air tinggi dan tidak memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.
4. Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air. (PU)

F. Strategi 6

Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum , Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum. (PDAM, PU, Dinas Kesehatan dan Koordinator Bappeda)
2. Membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi / lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor. (Bappeda)
3. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum. (Pusat, Bappeda, PU)

4.2.2. KEBIJAKAN 2

Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan Penyelenggaraan alternative sumber pembiayaan.

A. Strategi 1

Meningkatkan kemampuan financial internal Penyelenggara SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan. (Pusat, PDAM)
2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya. (PDAM)
3. Mempercepat penyelesaian restrukturisasi hutang PDAM;

B. Strategi 2

Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Penyelenggaraan SPAM. (Bappeda, PU)
2. Memberi stimulant untuk mendorong Penyelenggaraan SPAM oleh masyarakat secara mandiri. (AMPL)
3. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) bagi Penyelenggaraan SPAM di daerah. (Bappeda)

C. Strategi 3

Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah. (Bappeda)
2. Memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR.
3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program Penyelenggaraan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak. (Bappeda dan PU)
4. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR. (Pokja AMPL)
5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.

D. Strategi 4

Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun scenario SPAM dan Penyelenggara yang di danai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan. (Bappeda)
2. Memfasilitasi Penyelenggara untuk mengakses berbagai alternative sumber pembiayaan bagi Penyelenggaraan SPAM. (Bappeda)
3. Mempercepat proses pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009. (Setda, Bappeda)
4. Menyusun scenario alternative pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam Penyelenggaraan SPAM. (Bappeda)

4.2.3. KEBIJAKAN 3

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM

A. Strategi 1

Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. (Pusat, PU, Bappeda, PDAM)
2. Mendorong pengisian jabatan structural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

B. Strategi 2

Memperkuat peran dan Fungsi dinas/instansi/SKPD dalam Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM. (Setda, PU)
2. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM. (Setda, PU)
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam :
 - a) Perencanaan,
 - b) Pelaksanaan
 - c) Pengawasan, dan
 - d) Penyediaan data dan informasi.

C. Strategi 3

Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional. (PDAM)
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM. (PDAM)
3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik. (PU dan PDAM)
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM. (PU)
5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien. (PU dan Pusat)

D. Strategi 4

Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent*.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent* (CoE). (Pusat dan Setda)
2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE. (Bappeda , PU)
3. Meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi provinsi, dan fasilitas. (Bappeda, PU dan PDAM).

E. Strategi 5

Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien. (Pusat, PU)
2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset. (Pusat, PU)
3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset PDAM. (PDAM)

4.2.4. KEBIJAKAN 4

Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah

A. Strategi 1

Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM (amanat UU 23/2014 dan PP 38/2007) (Setda)
2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan terhadap penerapan NSPK

B. Strategi 2

Menyelenggarakan Penyelenggaraan SPAM sesuai dengan kaidah teknis.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (PDAM)
2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan Penyelenggaraan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap. (PDAM & PU)
3. Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis. (PDAM & PU)
4. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap. (PDAM & PU)

5. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap. (PDAM & PU)
6. Melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku (Permenkes). (Dinas Kesehatan & PDAM)
7. Memanfaatkan Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM sebagai alat control untuk setiap tahapan pembangunan. (Bappeda, Dinas PU, PDAM)
8. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM. (Dinas PU)

4.2.5. KEBIJAKAN 5

Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

A. Strategi 1

Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kota dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air . oleh PDAM dan BWS.
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan tambang inkonvensional, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait dan koordinator Bappeda.
3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah. (ESDM)
5. Memfasilitasi kecamatan/kelurahan untuk membangun sumur resapan, terutama di daerah pemukiman. (PU, ESDM)

B. Strategi 2

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai. (bersama BWS)
2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum.
3. Meningkatkan upaya Penyelenggaraan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan.
4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air.
5. Memfasilitasi pemerintah daerah yang memiliki fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik.
6. Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri.

C. Strategi 3

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi neraca air (*Water balance*). (Bersama BWS terkait)
2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum wilayah sampai jangka waktu tertentu .
3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.
4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

D. Strategi 4

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku.
2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional.
3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan.

4. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku.
5. Memantapkan criteria kesiapan usulan (*readiness criteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

4.2.6. KEBIJAKAN 6

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

A. Strategi 1

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan. (oleh Dinas Kesehatan)
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan PDAM; (Oleh Dinas PU pada proyek-proyek berbasis masyarakat)
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan.
4. Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat. (oleh pokja AMPL)
5. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum.
6. Menyebarkan contoh keberhasilan (*best practice*) kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan SPAM.
7. Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen. (oleh PDAM)
8. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM. (oleh PDAM)
9. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air. (oleh pokja AMPL)

10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.

4.2.7. KEBIJAKAN 7

Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM

A. Strategi 1

Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian / swasta / perguruan tinggi untuk mengembangkan :

- a) Inovasi teknologi dalam Penyelenggaraan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku pada awal tahun 2015 oleh Dinas PU;
- b) Inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energy dan penurunan kehilangan air fisik. (membangun unit pengolahan lumpur) oleh PDAM pada awal tahun 2015;

B. Strategi 2

Memasarkan hasil inovasi teknologi

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi.
2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi oleh Dinas PU.
3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.
4. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui Penyelenggaraan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.

C. Strategi 3

Menerapkan teknologi tepat guna dalam Penyelenggaraan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani PDAM terutama untuk proyek-proyek DAK.
2. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal.
3. Melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energy dan penurunan kehilangan air fisik. Oleh PDAM
4. Mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan nonkonsumsi.

D. Strategi 4

Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk melakukan mengembangkan *life cycle assessment* dalam pengelolaan air minum.
2. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan *design for sustainability* pada pengelolaan air minum.

**RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

Bab 5



5.1. UMUM

- 1 Cakupan Pelayanan Air Minum Perpipaan Dari PNPM Perdesaan Dan Perkotaan, PDAM Dan Pamsimas Kabupaten Temanggung Melayani ± 312.674 Jiwa (42,63 %)

URAIAN	PENDUDUK (jiwa)
PAMSIMAS	130.291
PNPM Desa/ Kota	70.156
PDAM	112.227
DAK PSAB	19.091
Lain-lain	102.400
JUMLAH	434.165

- 2 Percepatan Investasi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target RPJMN (2019), RPJMD (2018) yaitu cakupan pelayanan akses aman air minum 100% pada tahun 2019;
- 3 Untuk mencapai sasaran tersebut diatas skenario teknis/fisik adalah:

SPAM	Target 2019	Peningkatan %
JP PDAM	25%	9.8%
JP NON PDAM	60%	16.5%
NJP terlindungi oleh Masyarakat	15%	

- 4 Untuk pelayanan PDAM, Penambahan sambungan barunya sebanyak 13.250 unit atau dengan jumlah sambungan menjadi 42.602 unit. Penambahan sambungan tersebut dilakukan secara bertahap dengan penambahan sambungan baru antara 2.150 – 2.200 unit SR.
- 5 Adapun demi menyelamatkan kehilangan air akibat kesalahan pembacaan meter dilakukan penggantian terhadap meter-meter tua dan rusak sejumlah 40.000 unit. Penggantian meter tua dan rusak ini dilakukan pula secara bertahap dengan jumlah penggantian meter 7.000 unit atau 23% dari jumlah SR tiap awal tahun
- 6 Biaya untuk peningkatan BJP tidak terlindungi menjadi terlindungi dari dana APBD, APBN dan P.S Masyarakat.

5.2. ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN

Selama ini pemerintah daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain diluar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada pusat investasi pemerintah (PIP), business to business (B to B), pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR)/program kementerian dan bina lingkungan (PKBL) dan obligasi;

5.3. KEGIATAN DAN RENCANA TINDAK

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM;
2. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM;
3. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, PKBL BUMN pedili, PIP dan sumber pembiayaan lainnya untuk Penyelenggaraan SPAM;
4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk air minum;

5. Melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah terpencil dan daerah rawan air;
-

PENUTUP

Bab

6



Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Temanggung ini sebagai amanat dari PP No PP 38/2007 tentang Penyelenggaraan SPAM, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Temanggung akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penterjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan.

Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Temanggung ini, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait SKPD Kabupaten Temanggung sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Penyelenggaraan SPAM.

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO